

MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

OBATI EKONOMI, REDAKAN IMBAS PANDEMI

Pandemi masih belum berakhir hingga saat ini. Imbasnya pun terasa di semua lini, termasuk ekonomi. Pemerintah senantiasa adaptif mengantisipasi demi menghindari resesi. Bagi pemerintah, kepentingan rakyat di atas segalanya. Untuk itulah, roda ekonomi diberikan stimulus melalui ragam upaya.



Daftar Isi



COVER STORY:

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian. Pelaksanaan program ini digambarkan dengan orang berbaju putih hitam yang melambangkan pemerintah sedang membawa kotak P3K. Kotak P3K itu sendiri diibaratkan sebagai perlengkapan pertolongan pertama saat terjadi kondisi darurat agar meminimalisir efek yang lebih parah.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Foto Cover:

Resha Aditya Pratama

- 5 **DARI LAPANGAN BANTENG**
- 6 **EKSPOSUR**

LAPORAN UTAMA

- 8 Bertahan Hidup, Bertahan Menghidupi
- 12 Siapkan Skenario Pulihkan Ekonomi
- 16 Infografik
- 18 Pemulihan dalam Tiap Lini Kehidupan
- 20 'Whatever It Takes'

PHOTO STORY

- 22 Loka Kelola Gembala Sapi

TEKA TEKI

- 24 Teka Teki Medkeu

WAWANCARA

- 25 Membalikkan Arah Pendidikan

POTRET KANTOR

- 28 Si Nona Muda di Gelap Perbatasan

BAGAIMANA CARANYA?

- 31 Alur Komunikasi Di masa Pandemi

PROFESI

- 32 Kaya Pengalaman Berkat Cobaan

BUGAR

- 35 Potret Masa Muda Hamka

Opini

- 36 Setelah Ratifikasi Paris Agreement, Perlukah Pungutan Atas Karbon?

Uang Kita Buat Apa

- 38 Suplai Energi, Terangi Negeri

Opini

- 40 Disrupsi Perdagangan Internasional dan Kebijakan Fiskal

Generasi Emas

- 42 Menjadi Versi Terbaik dari Diri

Lokal

- 44 Berwisata Bahari ke Kendari

Finansial

- 46 Nyaman Saat Pensiun

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Kasubbag Publikasi Cetak Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Suroho, Budi Prayitno, Budi Sulisty. **Tim Redaksi:** Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Dara Haspramudilla, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, CS. Purwowidhu Widayanti, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Andi Al Hakim, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Almajaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Ditto Novenska. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



SURVEI MAJALAH MEDIA KEUANGAN 2020

Bantu kami menjadi lebih baik. Luangkan waktu Anda semenit untuk mengisi "Survei Majalah Media Keuangan 2020". Pindai QR code di samping atau akses:

bit.ly/surveimedkeu

untuk menuju laman pengisian form survei.

Sepuluh responden yang beruntung akan mendapatkan paket souvenir dari kami.

Kami tunggu partisipasi Anda hingga **31 Agustus 2020**.

- pindai QR Code ini -



Rapatkan Barisan, Merajut Harapan!

Meski dengan nafas tersengal-sengal karena separuh paru-parunya rusak dihantam tuberkulosis, semangat Sang Jenderal bergerilya menembus medan hutan masih terus membara untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda yang kedua.

*"Meski kita terbatas peluru, senjata...
Meski kita kedinginan seperti
sekarang, kelaparan...
Tapi kita mempunyai niat yang mulia
Niat yang akan memenangkan
peperangan ini
Ini bukan lagi soal keadaan diri
Tapi ini soal perjuangan demi rakyat"*

Itulah sepenggal dialog tokoh Soedirman dalam film berjudul "Jenderal Soedirman" yang diperankan oleh Adipati Dolken garapan sutradara Viva Westi. Lugas, patriotik, berani dalam berjuang. Adakah semangat gerilya Soedirman tujuh dasawarsa lalu itu masih terasa hari ini?

Tahun 2020 kita berhadapan dengan perang yang berbeda. Musuh bernama COVID-19 itu tak tampak kasat mata, tapi korbannya yaitu manusia dibuat tumbang

tak berdaya. Ya, musuh pandemi COVID-19 masih merajalela dan menyerang mereka yang lengah dan berdaya lemah.

Di bulan perayaan ke-75 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita masih berada pada situasi yang tidak pasti. Pandemi COVID-19 telah memberikan efek domino, tak hanya soal krisis kesehatan tetapi juga krisis pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Karena kegentingan itulah, pemerintah mengambil langkah responsif dan luar biasa melalui kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar masalah kesehatan tak merembet jauh menjadi gejala sosial, ekonomi, dan keuangan.

Ada pelajaran yang sangat mahal dan berharga dari semua ini. Virus penyebab batuk dan demam yang bisa mematikan diri sekaligus ekonomi. Masker dan *sanitizer* yang bisa menyambung nyawa. Rasa saling peduli dari mereka meski tak pernah mengenali. Banyak hal yang uang tak bisa beli, seperti semangat bangkit meski sudah terhimpit. Pemerintah yang hadir dengan peran *counter cyclical* telah menyiapkan seperangkat obat agar jiwa raga dan ekonomi selamat.

Program PEN adalah wujud nyata suntikan semangat untuk bangkit bagi

keluarga, pengusaha, pelaku ekonomi UMKM, hingga korporasi. PEN adalah bentuk kehadiran pemerintah. Meski jalan menuju pemulihan penuh ketidakpastian dan penuh tantangan, namun Pemerintah akan terus melakukan upaya pemulihan pandemi ini dalam 3 tahun ke depan, sesuai dengan yang telah diijinkan dalam undang-undang.

Di edisi bulan kemerdekaan ini, Pembaca dapat memahami lebih dalam semangat gerilya Pemerintah memerangi pandemi COVID-19 dengan PEN sebagai senjatanya. Seperti apa amunisi, sasaran tembak, dan target kemenangan yang ingin dicapai.

Tema "Indonesia Maju" pada perayaan HUT RI ke-75 ini adalah simbol semangat gerilya bagi pemerintah dan rakyatnya untuk bahu-membahu bangkit bersama dan maju memenangkan perang melawan COVID-19, seperti ujaran semangat Jenderal Soedirman "Rapatkan barisan, ayo rajut harapan. Merdeka!"

Rahayu Puspasari

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu



Majalah Media Keuangan
[@majalahmediakeuangan](https://www.instagram.com/majalahmediakeuangan)

Menurut #OpiniAnda, program manakah yang paling berdampak pada pemulihan usaha para pelaku UMKM?
1. Program subsidi bunga bagi UMKM
2. Program penjaminan modal kerja untuk UMKM

3. Insentif PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah
4. Pembiayaan investasi pada koperasi
5. Penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional

@ienamor
3. Agar UMKM bisa fokus untuk mengembangkan atau pivoting penjualannya selama pandemi, tidak terbebani dengan pikiran bagaimana bayar pajak

@luckysitorus
1. Agar umkm/usaha mikro dapat merasakan manfaat

langsung serta dapat menghindari rentenir.

@nrdsasmt_
2. Dukungan tersebut mempercepat pemulihan sektor UMKM Indonesia. Penyaluran kredit jadi lebih cepat dengan kualitas yang meningkat.



www.kemenkeu.go.id



Kementerian Keuangan RI



@KemenkeuRI



Kemenkeu RI



kemenkeuri



majalahmediakeuangan



Pengawas Lintas Batas

Foto Rifki Rangkuti | Teks Anas Nur Huda

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan pintu gerbang yang didirikan untuk memantau dan mengamankan perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu, PLBN adalah bukti kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wajah negara Indonesia, tentunya kita tidak ingin bila kita tampak buruk di mata negara-negara lain. Sejalan dengan itu, Bea Cukai mendirikan Pos Pengawas Lintas Batas (PPLB) di setiap PLBN sebagai salah satu upaya menegah barang yang tidak memenuhi ketentuan dan berpotensi merugikan negara.



Program PEN mencakup tiga hal utama yakni penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.

Foto
Anas Nur Huda

BERTAHAN HIDUP, BERTAHAN MENGHIDUPI

Teks A. Wirananda

Pandemi yang tak kunjung menyingkir memaksa sebagian masyarakat tersingkir. Dampak pandemi kali ini menghantam nyaris semua lini. Segala yang wajar masing-masing mulai menjauh pergi dan entah kapan kembali. Belum satupun yang mampu menerka akhir pandemi dengan presisi. Namun, segala yang hidup mesti dihidupi. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu membantu masyarakat untuk tetap bertahan hidup, untuk tetap bertahan saling menghidupi.

Ekonomi pandemi

Tak ada satupun negara di dunia yang siap berhadapan dengan pandemi. Beragam strategi diterapkan masing-masing negara untuk bertahan melewati krisis, termasuk Indonesia. Beragam kebijakan diterbitkan demi menyelamatkan berbagai lini terdampak pandemi. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, “Saya bilang ini ekonomi pandemi. Ekonomi pandemi itu ekonomi yang dikerahkan dengan segala daya upaya untuk mengalahkan pandemi, dan dampak pandemi itu.” Tak semata kesehatan, namun juga dampak-dampak lain yang mengikutinya. “Kalau kesehatan kena, (lantas) tidak tertangani dengan baik akan menciptakan dampak sosial. Dampak sosial yang eskalasinya meninggi, tidak bisa diatasi akan menimbulkan dampak ekonomi, krisis. Ketika krisis terjadi, dampak sosial akan lebih besar lagi, lalu kolaps secara ekonomi nasional,” tuturnya.

Kondisi semacam itu kemudian menjadi dasar bagi pemerintah dalam bersikap. Yustinus mengatakan bahwa kebijakan PEN ini bukan menjadikan ekonomi sebagai panglima. Alih-alih demikian, kebijakan ini justru mendudukkan kembali ekonomi pada perspektif asalnya, yakni ihwal kelangsungan hidup. “Ekonomi itu ya soal survival. Soal hidup orang. Soal bagaimana pelaku UMKM bisa berjualan lagi, itulah ekonomi. Soal bagaimana orang yang di-PHK itu bisa makan, itu adalah ekonomi,” tutur alumni pascasarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini. Karena itu, program PEN setidaknya mencakup tiga hal utama yakni penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.

Selaras dengan hal itu, peneliti

senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad berpendapat bahwa program PEN sudah mengakomodasi agenda untuk mitigasi risiko resesi. “Secara umum sebenarnya sudah menangkap beberapa agenda mengantisipasi mitigasi risiko resesi, baik untuk bantuan sosial, penanganan kesehatan hingga ekonomi,” katanya melalui keterangan tertulis.



Menjaga Momentum

Pemulihan ekonomi nasional ibarat perjalanan panjang yang melintasi berbagai jalan terjal. Kendaraan yang mutakhir serta pengemudi yang mumpuni tak serta merta jadi faktor utama. Kendati risiko telah dipotret dan diantisipasi dengan baik, tidak lantas PEN jadi bersih dari catatan.

Tauhid Ahmad menuturkan apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan program serupa, program PEN sudah hampir sejajar.

Namun demikian, menurutnya masih terdapat beberapa hal yang masih perlu dievaluasi, antara lain ihwal mekanisme bantuan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM.

Tauhid menyarankan adanya evaluasi bentuk bantuan sosial. “Pertama, bentuk non-tunai hanya menguntungkan pada rantai nilai yang dimiliki sebagian kecil pengusaha. Ini terjadi karena lembaga usaha yang dilibatkan dalam bantuan sembako sangat terbatas,” katanya. “Kedua, karena diberikan dalam bentuk non tunai (sembako, minyak, sarden, gula, dsb) maka yang berputar kebutuhan hanya pada komoditas tersebut sehingga tidak dapat menggerakkan UMKM kebutuhan lainnya,” paparnya melalui keterangan tertulis.

Sedangkan terkait stimulus bagi pelaku UMKM, Tauhid mengkhawatirkan keberadaan pelaku UMKM di luar jangkauan perbankan berpotensi menurunkan tingkat efektivitas kebijakan ini. Sebab menurutnya, beragam program stimulus yang ada saat ini belum dapat menjangkau kelompok yang berada di luar jangkauan perbankan tersebut.

Dari kekhawatiran itu, Tauhid menyarankan beberapa hal untuk mendorong efektivitas PEN. Bagi pelaku UMKM, Tauhid berpendapat perlunya skema khusus untuk menjangkau para pelaku UMKM yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan.

Sementara itu, H.M. Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengatakan bahwa PEN adalah langkah yang tepat untuk dilakukan pemerintah. “Prinsipnya saya melihat dari sisi desain, PEN sebagai jurus untuk memulihkan ekonomi kita sudah sangat benar. Namun dari sisi realisasi ini yang kita harus hati-hati. Disiplin pada target, sehingga rencana di atas kertas bisa ditransformasikan menjadi intervensi lapangan yang berdampak,” paparnya



melalui keterangan tertulis.

Pria kelahiran Sumenep ini mengatakan bahwa saat ini realisasi program-program yang ada masih terbilang rendah. “Sektor kesehatan, misalnya, serapannya baru 5,12 persen. Padahal sektor ini adalah episentrum masalah,” paparnya. Ia khawatir, realisasi yang rendah ini tatkala diburu target realisasi tinggi dapat berakibat eksekusi yang kurang akurat. Situasi demikian menurutnya akan mempengaruhi efektivitas program. Senada dengan Tauhid Ahmad, Said juga berpendapat bahwa momentum adalah faktor penting dalam keberhasilan program PEN.

Integrasi Data

Tantangan pemulihan ekonomi nasional tidak luput dari perkara data. Misalnya, terkait skema khusus bagi pelaku UMKM yang tidak terjangkau perbankan yang sebelumnya ia sampaikan, Tauhid Ahmad berpendapat bahwa kondisi itu tidak serta merta dapat dicapai tanpa pendataan yang memadai. “Ini tentu dengan proses pendataan yang memadai dan sebagai

langkah awal dapat menggunakan data Sensus Ekonomi BPS Tahun 2016/2017 yang memuat cukup detail dengan tambahannya adanya *update* tahun 2020,” papar Tauhid. Lantas terkait bantuan sosial, ia beranggapan bahwa data yang dijadikan basis pendistribusian yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tak lagi relevan dengan kondisi lapangan.

Untuk itu, Tauhid menyarankan pemerintah perlu memperkuat integrasi bantuan untuk pelaku UMKM dalam “satu pintu” dengan menggabungkan dan verifikasi data yang ada di perbankan, data perpajakan, serta data pembinaan di Kementerian Koperasi dan UKM. “Ini memperkuat daya dorong UMKM lebih cepat pulih,” paparnya.

Perihal data, Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan, “Datanya tidak sempurna sudah pasti, tapi itu memang data terbaik yang kita punya. Dan, kita ingin melakukan program ini secepat mungkin. Kalaupun dia ada *inclusion-exclusion error* secara relatif harusnya bisa dipahami,” ujarnya.

Febrio juga menambahkan bahwa perbaikan data yang dijadikan acuan terus dilakukan pemerintah. Data yang andal, menurutnya, akan menopang program perlindungan sosial yang kredibel. “Tapi sementara ini kita memang butuh gerak cepat. Ada *inclusion-exclusion error* itu kita tolerir, sepanjang ini programnya memang arahnya ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. Hal ini kembali pada salah satu orientasi semula program PEN yakni menyelamatkan sisi rumah tangga. “Bagaimana rumah tangga masyarakat yang paling rentan ini ditolong dulu,” jelasnya.

Kendati tak alpa dari kendala, pemerintah terus berupaya memperbaiki implementasi program PEN melalui monitoring dan evaluasi. “Nah inilah tiap minggu dilakukan monev di Kemenkeu untuk mengevaluasi semua program ini. Mana yang jalan, mana yang kurang jalan. Yang kurang jalan, siap-siap untuk dicarikan cara yang lebih cepat, atau diganti programnya, dan sebagainya,” pungkas Kepala BKF.

SIAPKAN SKENARIO PULIHKAN EKONOMI

Teks Reni Saptati D.I

Krisis ekonomi pernah melanda negeri ini. Tahun 1998 dan 2008, krisis menerjang sektor keuangan. Nilai tukar rupiah terdepresiasi tajam. Kala itu, UMKM berperan besar menjadi penyangga perekonomian. Roda ekonomi nasional pun terus berputar. Kali ini, kondisinya jauh berbeda. Aktivitas masyarakat turun, sektor riil terpukul. Untuk mengatasi, pemerintah mengambil langkah cepat dan *extraordinary*. Terbungkus dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



Program PEN memberikan stimulus secara komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Foto
Resha Aditya P

Jika pemerintah tak lekas bertindak, kesulitan yang dihadapi masyarakat semakin berat. Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi nasional sudah terasa sangat besar. Laju ekonomi kuartal I 2020 tercatat 2,97 persen atau berkontraksi 2,41 persen dibanding kuartal IV 2019. Kontraksi mendalam juga dihadapi negara-negara lain di dunia. IMF memprediksi kontraksi ekonomi global hingga -4,9 persen. Bank Dunia mematok angka lebih rendah di kisaran -5,2 persen.

“Saat ini yang terkena itu masyarakat juga, tidak hanya sektor keuangan,” ungkap Plt. Kepala Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Adi Budiarmo. “*Hit-nya double*, di *supply* dan *demand*. Darimana *demand*? Karena kita harus *lockdown*, bahkan ada beberapa yang tidak boleh kerja. Artinya mereka akan menurunkan konsumsi. Lalu pada saat yang sama, produksi juga berhenti. Artinya apa? *Pressure* terhadap *supply* juga luar biasa besar,” tambahnya.

Tak hanya menekan angka pertumbuhan, pandemi berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penduduk miskin bisa bertambah antara 3,02 hingga 5,71 juta orang. Angka pengangguran dapat naik jumlah hingga jutaan. Langkah *extraordinary* dalam Program PEN menjadi upaya mengatasi kondisi tak menyenangkan ini. “Supaya tidak terpuruk terlalu dalam dan memakan banyak korban, standar kesehatan harus tinggi, tetapi dari sisi ekonomi, kita memitigasi risikonya juga harus kuat,” tegas pria yang meraih gelar Doctor dari Universitas of Canberra tersebut.

Pendekatan *demand* dan *supply*

Pendekatan dalam program PEN memberikan stimulus secara komprehensif baik dari sisi *demand* maupun *supply*. Dari sisi *demand*, stimulus bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Bentuknya berupa program perlindungan sosial baik yang bersifat perluasan dari program *existing* maupun program-program baru. Program *existing* meliputi Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Sementara itu, program-program baru terdiri atas Bantuan Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan diskon listrik. “Pertama adalah menyelamatkan kehidupan. Kalau tidak ada penerimaan, mereka tidak bisa makan. Makanya pemerintah *jor-joran* ke situ,” terang Adi.

Dari sisi *supply*, pemberian insentif perpajakan dan dukungan untuk dunia usaha ditujukan untuk mempertahankan aktivitas usaha sekaligus meningkatkan produksi nasional. “Yang menarik, insentif perpajakan ini juga kita dorong untuk kebijakan yang lebih *green*. Misalnya, investasi baru yang menggunakan energi terbarukan kita kasih *support* dengan *tax holiday*,” ujar Adi yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF.

Rentang stimulus yang diberikan mempertimbangkan waktu pandemi COVID-19, dari *survival mode* hingga *recovery mode*. Dengan akses bantuan yang luas dan terbuka, diharapkan penanganan efektif dapat dipercepat sehingga ekonomi nasional dapat terhindar dari krisis lebih dalam.

Monitoring dan evaluasi berkala

“Saya mendukung langkah-langkah cepat pemerintah dalam merumuskan peraturan teknis pelaksanaan dari implementasi PEN,” Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menyampaikan dukungannya. Namun demikian, ia menilai pemerintah juga sudah memahami bahwa implementasi antara peraturan dan pelaksanaan di lapangan terdapat celah. “Sebagai contoh, turunan peraturan dari PP 23 tahun 2020 atas program Penempatan Dana diikuti PMK 64 tahun 2020 tidak dapat terakselerasi oleh perbankan di lapangan akibat persyaratan yang terlalu *rigid* dalam akses program tersebut,” contohnya.

Oleh sebab itu, Dito berpendapat perlu ada monitoring dan evaluasi secara bersama baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan terhadap kondisi dan perkembangan industri jasa keuangan secara berkala.

Proses monitoring dan evaluasi implementasi PEN kini berjalan rutin. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) serta aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan POLRI) melakukan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program-program PEN. Di internal Kementerian Keuangan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. “Menteri Keuangan waktu itu telah menunjuk Tim Monev PEN yang diketuai Wakil Menteri Keuangan. Di tim itu ada empat sub tim besar,” ungkap Adi.

Proses monitoring dan evaluasi dimulai dari kelompok kerja yang dipimpin oleh Pejabat Eselon I yang dilakukan setiap hari, laporan ke Wakil Menteri Keuangan setiap 3 hari,

dan laporan ke Menteri Keuangan setiap minggu. Dalam setiap jenjang, dibahas perkembangan pelaksanaan program, identifikasi permasalahan, dan perumusan solusi untuk mengakselerasi dan mendorong efektivitas program.

Penyesuaian postur APBN

Untuk memastikan ketersediaan anggaran dalam penanganan pandemi, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur dan rincian APBN 2020. Awalnya, penyesuaian tersebut tertuang dalam Perpres 54/2020. Namun, melihat perkembangan hari demi hari dampak pandemi, penyesuaian postur APBN kembali dilakukan yang tertuang dalam Perpres 72/2020.

“Ketika menerbitkan Perpu 1/2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres 54/2020, pemerintah menambah defisit dari 1,76 persen ke 5,07 persen. Di Perpres 72 yang ditetapkan presiden tanggal 24 Juni lalu, dalam rangka mendukung sinergi dan perluasan ekstensifikasi penanganan pandemi ini, defisit diperlebar lagi menjadi 6,34 persen,” ujar Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Rofyanto Kurniawan.

Langkah tersebut dilakukan lantaran pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp60,9 triliun sebagai dampak perlambatan ekonomi. Di sisi lain, pemberian insentif perpajakan dan belanja negara menjadi lebih tinggi Rp125,3 triliun karena menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

Meskipun faktor ketidakpastian tinggi, Rofyanto mengungkapkan Perpres 72/2020 telah mengantisipasi dan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan muncul ke depan. “Tentunya dengan berbagai upaya yang kita lakukan, kita harapkan target yang ingin dicapai pemerintah bisa tercapai melalui Perpres 72/2020 ini, baik dari

sisi penanganan COVID-19, sisi makro ekonominya, maupun sisi sustainabilitas APBN-nya,” tuturnya. “Pemerintah sudah mengantisipasi berbagai ketidakpastian di depan. Kita sudah menyiapkan skenario untuk program-program yang akan dijalankan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020.”

Sementara itu, terkait penyusunan RAPBN 2021, Rofyanto berharap tahun 2021 menjadi masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. “Kita harapkan tentunya penanganan pandemi ini bisa terfokus di tahun 2020 saja. Tahun 2021 kita sudah bisa fokus ke pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Ia pun memetakan beberapa tantangan perekonomian dan risiko yang perlu diwaspadai untuk dimitigasi. “Pertama, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pemulihan perekonomian global, termasuk pemulihan ekonomi kita, masih ada risiko ketidakpastian,” jelas Rofyanto. Kedua, Indonesia masih harus menghadapi tantangan untuk keluar dari *middle income trap*. Belum lama ini, Indonesia baru saja naik peringkat menjadi *upper middle income country*. Menurutnya, Indonesia harus bergerak ke arah *high income country*.

Dengan berbagai tantangan dan risiko, kebijakan fiskal 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Selain itu, kata Rofyanto, pemerintah juga akan menjalankan program-program reformasi, baik itu reformasi dari sisi pendapatan, belanja maupun dari sisi pembiayaan. “Untuk itulah, dalam menyiapkan RAPBN 2021, berbagai anggaran alokasi yang kita siapkan itu merupakan anggaran yang responsif, yang artinya dinamis bisa merespon berbagai dinamika perubahan yang akan terjadi,” pungkasnya.

MOBILE PPID KEMENKEU



Tampilan lebih user friendly terutama untuk tuna netra.

Tampilan baru pada menu riwayat permohonan informasi dan keberatan.

Kemudahan akses untuk menu permohonan informasi dan keberatan.

Keleluasaan bagi pengguna untuk update profil akun secara mandiri.

Unduh Mobile PPID, dapatkan kemudahan informasi terkait Kementerian Keuangan



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pandemi ini telah merubah arah perekonomian secara drastis di tahun 2020 dan memberi ancaman pada perekonomian dari sisi konsumsi dan sisi dunia usaha. Oleh karenanya, pemerintah berusaha mengatasinya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diarahkan pada perbaikan sisi *demand* dan *supply*.

PEN dilakukan pemerintah melalui



penyertaan modal negara (PMN)



penempatan dana



investasi pemerintah



penjaminan



belanja negara

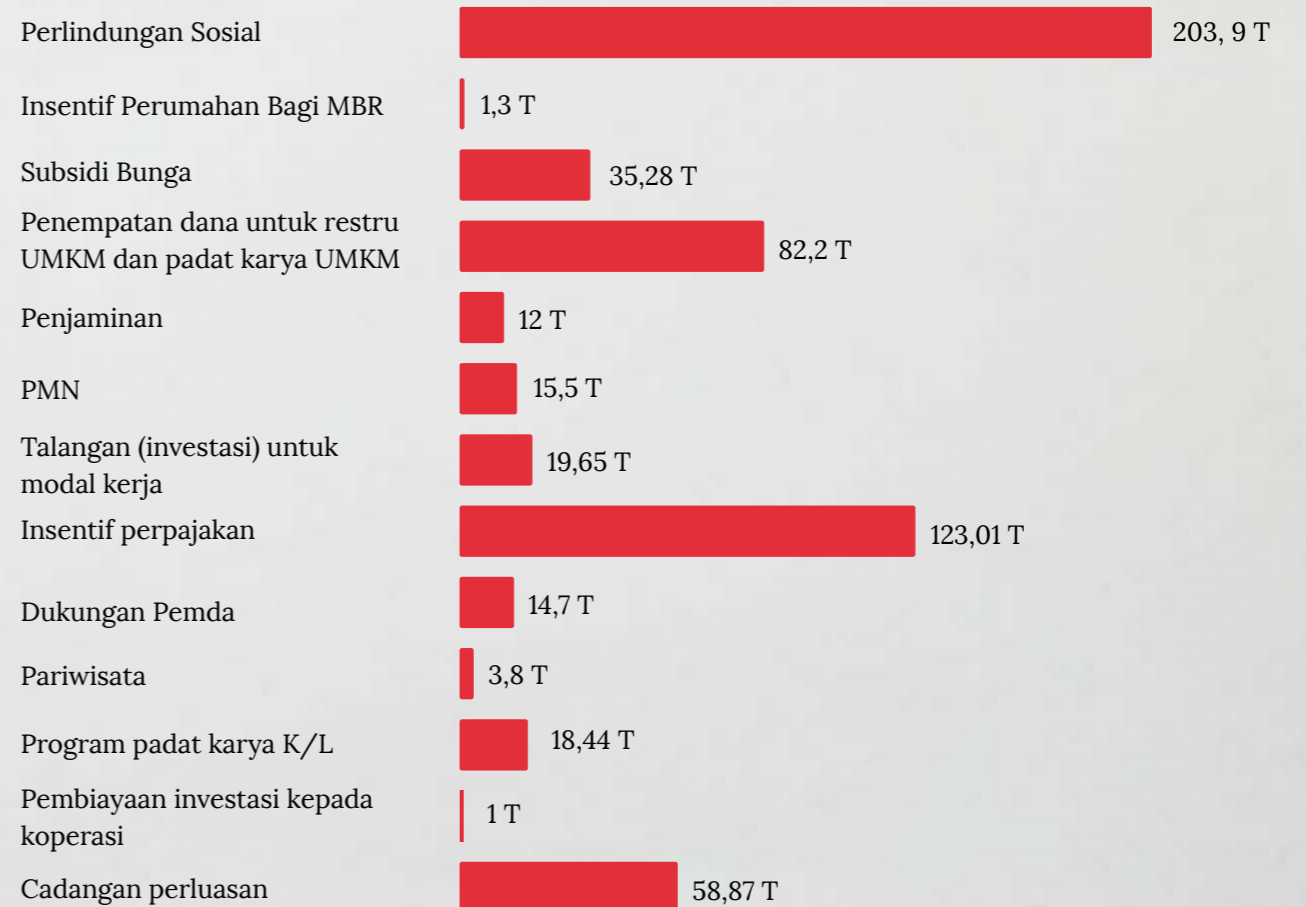
Landasan Hukum

PP nomor 23 Tahun 2020
Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
Perpres 72/2020 tentang Perubahan atas PP nomor 54 tahun 2020

Tujuan

Tujuan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) berdasarkan PP No. 23/2020
Tujuannya untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi

Biaya pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN (di luar biaya kesehatan penanganan Covid-19)



PEMULIHAN DALAM TIAP LINI KEHIDUPAN

Teks Dimach Putra

Tiap pagi Mujilah mengayuh sepedanya membelah kota Yogyakarta. Nenek berusia 66 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci dan setrika rumah tangga. Ada dan tiada wabah baginya sama saja. Yang penting tiap hari ia bisa menerima upah demi menyambung hidupnya.

Sebagai penggerak roda ekonomi di tingkat bawah, para pelaku UMKM layak menjadi penerima manfaat program PEN.

Foto
Resha Aditya P



Suatu pagi di Bulan Mei Mbah Jilah, begitu ia akrab dipanggil, bagai mendapat durian runtuh. Pak pos datang alih-alih membawakannya surat, malah memberi amplop berisi uang. Segepok uang sebanyak Rp1,8 juta itu merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Para penerima BST menerima Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan. Rupanya pihak RT/RW-lah yang memasukkan Mbah Jilah sebagai salah satu calon penerima bantuan. “Awalnya kaget, *wong* saya *ndak* tau apa-apa langsung dapat uang,” tutur Mbah Jilah.

BST merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam melindungi rakyatnya dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi COVID-19. Selain BST, ada juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pemberian paket sembako dan banyak jenis bantuan lainnya yang penyalurannya diserahkan Kementerian/Lembaga yang telah ditunjuk. Fungsi bantuan-bantuan ini bisa diibaratkan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat rentan seperti Mbah Jilah.

Supaya berkeadilan, pihak RT/RW sebagai pihak pendata awal harus jujur dan selektif. Para calon penerima bantuan adalah meraka yang belum pernah mendapat bantuan program lain agar tidak tumpang tindih. Tujuan dari pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi. Namun bagi Mujilah, uang sebanyak itu tak mungkin langsung ia habiskan. Sebagian ia tabung untuk berjaga, kalau-kalau wabah ini tak kunjung cepat pergi dan kondisinya bakal semakin membuatnya terancam kehilangan mata pencahariannya.

Agar perekonomian tetap bergerak

Sebagai penggerak roda ekonomi

di tingkat bawah, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) layak menjadi penerima manfaat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah telah menyiapkan skema subsidi bunga dan keringanan pembayaran pokok pinjaman sebesar total Rp35,28 triliun untuk 60,66 juta rekening pelaku UMKM agar bertahan di tengah pandemi. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan produk kebijakan terkait pemberian subsidi bunga/subsidi margin bagi pelaku UMKM dalam mendukung pelaksanaan program PEN. Yang terbaru Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 untuk merevisi PMK 65/PMK.05/2020 agar fasilitas subsidi bunga dari pemerintah lebih mudah lagi untuk diakses para pelaku UMKM. Mereka tak perlu lagi melakukan registrasi untuk mendapat subsidi bunga. Beragam kemudahan bagi para pelaku UMKM ini kian digalakkan.

Pelaku UMKM telah banyak yang berhasil mendapat bantuan pemerintah. Namun ruang untuk perbaikan masih sangat diperlukan. Hermawati Setyorini, Ketua Asosiasi UMKM AKU MANDIRI menyayangkan kurang masifnya sosialisasi tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengaku mengetahui informasi tersebut dari berita di televisi. Baru setelah berhasil mencoba sendiri, ia membagikan pengalamannya ke seluruh anggotanya di penjuru Indonesia. “*Mbok yha* kami para asosiasi UMKM ini digandeng dalam sosialisasi. Tolong jelaskan kepada kami dengan bahasa sederhana hingga paham. Nanti kami bisa bantu sebarkan lebih luas lagi lewat jejaring yang kami punya,” tawar Hermawati.

Suntikan bagi sang pahlawan

Tak hanya peduli pada golongan masyarakat ekonomi lemah saja, Pemerintah juga menunjukkan perhatiannya bagi para tenaga kesehatan (nakes). Para pejuang di garda terdepan ini telah bertaruh nyawa sejak kasus pertama COVID-19 muncul di tanah air. Melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah telah mengatur

syarat, besaran insentif, dan mekanisme penyalurannya bagi para tenaga kesehatan yang langsung menangani COVID-19.

“Iya kami semua telah didaftarkan oleh RS ke Kemenkes untuk mendapat insentif itu sejak April lalu, tapi belum ada realisasi apapun,” ungkap dr. Tulus Sp.PD, Koordinator Tim Penanganan COVID-19 RS. Al Islam Bandung. Proses verifikasi dan perhitungan yang lambat menjadi alasan yang dilontarkan tiap kali Tulus menanyakan progres penyaluran insentif bagi sejawat nakes yang ia koordinir.

“Sebenarnya kami tidak terlalu berharap sejak awal muncul wacana ini. Tapi jika memang benar-benar dapat ya rezeki namanya,” ucapnya. Tulus sadar bahwa ada berlapis birokrasi yang harus dipenetrasi hingga sampai akhirnya insentif tersebut turun ke para nakes. Ia pun sadar akan hierarki rujukan pasien ke rumah sakit. Setidaknya kabar bahwa nakes di rumah sakit rujukan utama sudah mulai menerima hak mereka cukup menyejukkan baginya. Bagaimanapun Tulus dan sejawatnya sadar bahwa tanggung jawab utamanya adalah menyelamatkan nyawa para pasien.

Pemerintah tak begitu saja membuang badan melihat para nakes yang legowo meski belum menerima haknya. Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna Juni 2020 tampak meluapkan kekecewaannya karena penyerapan dana kesehatan baru sebesar 1,53 persen dari 75 triliun yang telah dianggarkan. Sejak kejadian itu, Kemenkes telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Hk.01.07/Menkes392/2020 yang merevisi keputusan sebelumnya. Saat ini insentif bagi nakes sudah bisa diminta langsung dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) apabila telah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyaluran insentif bagi nakes yang berhak seperti dr. Tulus dan para sejawatnya.

'WHATEVER IT TAKES'

Teks CS. Purwowidhu

Pola permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di seluruh dunia berubah akibat COVID-19 yang secara alamiah membentuk kebiasaan baru dalam perekonomian. Menyikapi kondisi ini pemerintah telah menyusun beragam program yang menasar pemulihan ekonomi, baik di sisi *demand* maupun *supply*. Pemerintah pun telah merevisi APBN 2020 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam revisi baru, pemerintah memperluas defisit anggaran menjadi 6,34 persen dari PDB. Simak petikan wawancara Media Keuangan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu, mengenai upaya pemulihan ekonomi nasional.

Apa tujuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)?

Program PEN ini ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kita mulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha, lagi-lagi kita lihat yang paling rentan yaitu UMI dan UMKM. Lalu dengan logika yang sama kita menciptakan kredit modal kerja untuk korporasi. Kita juga akan berikan *special treatment* untuk sektor pariwisata, perdagangan, dan pabrik-pabrik padat

karya yang kita *ases* terdampak sangat dalam dan cukup lama. Jadi semua ini bertahap kita *ases* secara *well measure*. Pelan-pelan kita mulai dorong aktivitas perekonomian. Dengan adanya program PEN diharapkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat krisis pandemi dan pembatasan aktivitas tidak terlalu dalam.

Bagaimana efektivitas program PEN sejauh ini?

Sejauh ini di sisi rumah tangga yakni perlindungan sosial relatif paling efektif. Namun di sisi lain memang masih cukup menantang. Untuk kesehatan, penyerapannya masih rendah karena kendala pada pelaksanaan di lapangan seperti keterlambatan klaim biaya perawatan dan insentif tenaga kesehatan karena kendala administrasi dan verifikasi yang *rigid*. Tapi bulan Juli ini sudah dipercepat dengan adanya revisi KepMenkes. Selanjutnya, dukungan untuk UMKM sudah mulai berjalan, khususnya subsidi bunga untuk KUR. Ini memang cukup menantang karena melibatkan puluhan bank dan lembaga keuangan yang kapasitas teknologi pengolahannya tidak sama.

Salah satu yang juga sedang didorong dan cukup efektif adalah bentuk penjaminan kredit modal kerja dan dipasangkan dengan penempatan dana murah di perbankan. Nah, ini sudah jalan tiga minggu, pemerintah menempatkan Rp30 triliun di Bank Himbara lalu didorong dengan penjaminan itu kemudian sekarang sudah tercipta lebih dari Rp20 triliun kredit modal kerja baru.

Untuk insentif perpajakan masih belum optimal karena wajib pajak yang berhak untuk memanfaatkan insentif tidak mengajukan permohonan dan perlunya sosialisasi yang lebih masif dengan melibatkan *stakeholders* terkait. Merespon hal ini, kita melakukan simplifikasi prosedur agar lebih mudah dijalankan oleh calon *beneficiary*.

Upaya apa yang dilakukan untuk perbaikan program PEN?

Setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dalam rangka program PEN, termasuk monitoring dan evaluasi yang kita lakukan setiap minggu akan mengikuti kondisi perekonomian saat ini. Semua program kita evaluasi, mana yang jalan dan mana yang kurang. Yang kurang efektif siap-siap untuk dicarikan cara yang lebih cepat atau diganti programnya dan sebagainya supaya bisa diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sampai kapan program PEN diluncurkan?

Pemerintah akan meneruskan kebijakan yang bersifat preventif dan adaptif dengan perkembangan kasus dan dampak dari COVID-19. Meski tanda-tanda pemulihan ekonomi mulai terlihat namun pemulihan pasti terjadi perlahan-lahan. Karena selama belum ditemukan obat atau vaksin yang efektif tentunya kita masih dihadapkan dengan risiko inheren. Nah, risiko ini yang terus kita *ases*. Yang pasti, tujuan pemerintah adalah terus membantu masyarakat yang terdampak COVID-19.

Bagaimana mitigasi risiko dalam upaya pemulihan ekonomi?

Saat ini kita dalam suasana krisis dan kita ingin mendorong perekonomian

agar pulih sesegera mungkin. Risiko ekonomi yang lebih besar adalah resesi. Untuk itu jangan sampai kita gagal menstimulasi ekonomi, padahal kita memang sudah ada *budget*-nya. Itu yang menjadi tantangan dan menjadi cambuk bagi kita pemerintah setiap hari, supaya kita bisa lebih efektif. Pemerintah melakukan apa yang bisa dilakukan untuk mendorong pemulihan aktivitas ekonomi. Kita tidak mau resesi, kita tidak mau jumlah pengangguran dan orang miskin bertambah. Pemerintah siap memberikan *support* supaya momentum pemulihan ini semakin besar meskipun risikonya juga masih ada.

Yang terpenting tata kelolanya baik dan risiko dihitung dengan baik. Semuanya di *well measured*, kita tahu risikonya, kita bandingkan dengan risiko yang lebih besar, kita pilih kebijakan yang meminimize dampak yang paling berat bagi perekonomian dan masyarakat kita secara keseluruhan.

Penambahan anggaran PEN menjadi Rp695,2 triliun diikuti dengan pelebaran defisit 6,34 persen saat ini. Bagaimana posisi fiskal dalam kondisi tersebut?

Kita punya ruang untuk bergerak secara fiskal karena selama ini kita melakukan kebijakan makro yang hati-hati dan *prudent*. Karena kita sudah melakukan disiplin fiskal yang cukup ketat selama bertahun-tahun, sehingga rasio utang kita rendah maka itu membuat kita punya ruang untuk melakukan pelebaran defisit sampai tiga tahun. Negara lain tidak banyak yang punya *privilege* itu, bahkan tahun ini banyak yang defisitnya *double digit*. Saat ini defisit kita 6,34 persen, tahun depan kita akan turun ke sekitar 4,7 persen, tahun depannya lagi akan turun ke tiga koma sekian. Tahun 2023 kita tetap *committed* untuk balik ke disiplin fiskal sebelumnya di bawah 3 persen.

Apa prinsip utama dalam mengambil kebijakan fiskal di tengah ketidakpastian waktu berakhirnya krisis pandemi ini?

"Whatever it takes" (apapun yang diperlukan), itu sudah pasti menjadi prinsip utama, tapi dalam konteks kita mau melindungi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita berupaya

agar pengangguran dan kemiskinan tidak bertambah banyak. Bagaimana memberikan kebijakan yang benar-benar bisa berdampak kepada masyarakat, itu fokus kita. Prinsip lainnya tepat sasaran, akseleratif, gotong royong, seperti kebijakan *burden sharing* yang pemerintah lakukan dengan BI. Dan yang harus selalu diingat adalah untuk menghindari *moral hazard*.

Pemerintah juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) untuk memastikan proses pembuatan kebijakan, serta pengawalan dalam implementasi program PEN ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN?

Saya pikir itu sangat bagus untuk koordinasi. PEN ini kan melibatkan banyak K/L misalnya untuk Kesehatan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) nya Kementerian Kesehatan, subsidi bunga untuk KUR dan non-KUR ada di Kementerian Koperasi, penjaminan KPA-nya Kementerian BUMN, dsb. Di samping itu, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi ini harus dilihat sebagai satu *big picture*. Harus ada pertimbangan yang serius dan seimbang antara risiko kesehatan dengan risiko resesi ekonomi. Semua ini kan perlu diorkestrasi dengan baik. Tugas koordinator untuk bisa membuat ini lebih terintegrasi.

Apa harapan Bapak terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan PEN?

Saya pikir ini memang tanggung jawab dari kita semua karena ekonomi ini sebenarnya hanya satu aspek dari kehidupan bangsa ini. Kehidupan di balik angka-angka itu lebih penting. Kalau aktivitas ekonominya jalan tapi kita tidak disiplin mengikuti protokol kesehatan ya risikonya terlalu besar. Intinya ini benar-benar memang harus kombinasi dari disiplin masyarakat dan kebijakan yang benar dan efektif. Keduanya harus jalan bersama dengan seimbang.



Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Foto Dok. BKF

Loka *Kelola* Gembala Sapi

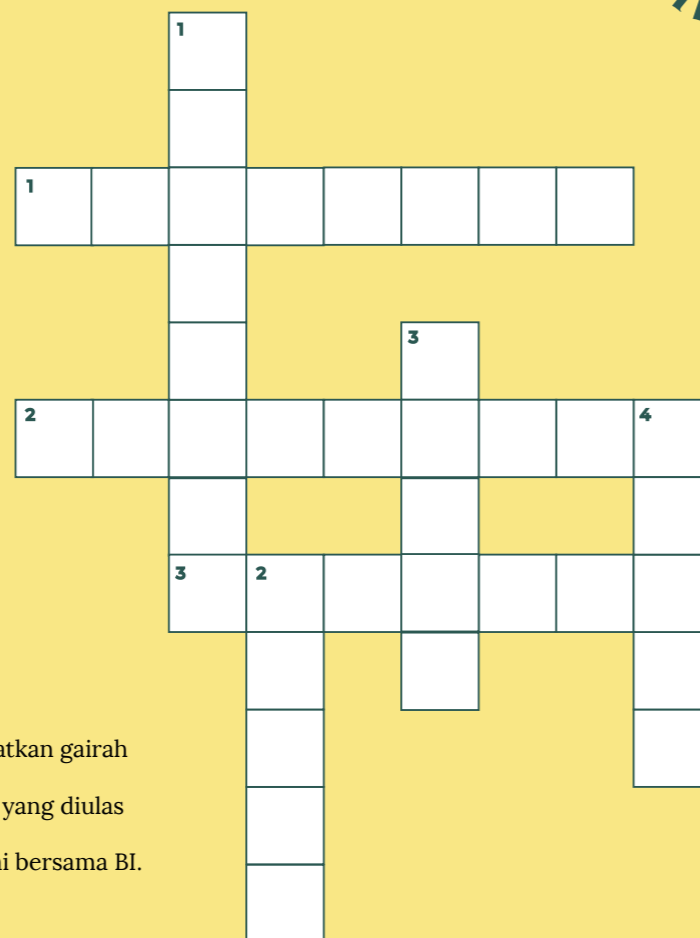
Foto Angga Rindra | Teks Resha Aditya P

Padang Mengatas adalah peternakan sapi yang berada di kaki Gunung Sago, Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Hampanan padang rumput yang luasnya lebih kurang 280 hektar ini mirip dengan Desa Hobbiton yang terletak di Selandia Baru. Sejauh mata memandang, pengunjung akan disuguhkan dengan ribuan sapi yang bebas berkeliaran. Hasil Peternakan yang dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas ini kemudian akan didistribusikan ke peternak sapi untuk memproduksi bibit sapi yang unggul.



Teka *Teki *
Med

Teka *Teki *
Medken



Mendatar

1. Tambah penghasilan untuk meningkatkan gairah kerja
2. Kantor vertikal Ditjen Bea Cukai dalam yang diulas dalam Potret Kantor
3. Pembagian beban penanganan pandemi bersama BI. Burden
4. Badan Layanan Umum

Menurun

1. Nama depan Stafsus Menkeu bidang Komunikasi Strategis
2. Penerimaan dari pihak lain yang tidak perlu dibayar kembali
3. Nama belakang Menkeu sebelum Bambang Brodjo negoro
4. Tangkas, cepat dan kuat

Kirim jawaban Anda melalui story post instagram dengan tag IG @majalahmediakeuangan atau melalui email mediakeuangan@kemenkeu.go.id, sertakan nama dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Jawaban kami tunggu sampai tanggal 10 September 2020.

Membalikkan Arah Pendidikan

Teks Reni Saptati D.I | Foto Anas Nur Huda

Gebrakan besar di dunia pendidikan Indonesia tengah terjadi. Sejumlah kebijakan menjadi pembuka jalan menuju sistem pendidikan ideal bagi anak-anak Indonesia. Salah satunya, program merdeka belajar.

Media Keuangan mendapat kesempatan untuk berbincang seputar merdeka belajar dan dunia pendidikan Indonesia dengan **Ketua Yayasan Guru Belajar, Bukik Setiawan**. Tuturnya, merdeka belajar menjadi harapan kita untuk membalikkan arah pendidikan yang dalam lima belas tahun terakhir mengalami penurunan.



Teka *Teki *
Medken

Berikut perbincangan lengkap kami dengan pria yang telah berpengalaman menjadi pendidik, penulis buku, juga pendiri Komunitas Guru Belajar di lebih dari 150 daerah tersebut.

Apakah makna dari merdeka belajar?

Banyak orang yang mengartikan merdeka belajar sebagai bebas belajar. Padahal sama sekali berbeda arti keduanya. Bebas itu kesempatan melakukan seluas-luasnya, tidak terikat. Merdeka itu berdiri sendiri, mengurus sendiri, tidak tergantung pada pihak lain.

Dengan demikian, merdeka belajar adalah mengurus sendiri kegiatan belajarnya. Murid yang merdeka belajar adalah murid yang mempunyai kemauan belajar dari dalam diri sendiri. Tidak perlu dipaksa-paksa untuk belajar. Bukankah itu profil murid yang kita idam-idamkan?

Mengapa merdeka belajar ini lahir?

Kondisi apa yang melatarbelakanginya?

Dalam 20 tahun terakhir, kecenderungan yang berkembang adalah belajar hanya sebatas untuk ujian. Tidak ada ujian, tidak belajar. Pada awalnya, niat baik belajar untuk ujian ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan. Tapi kenyataannya, baik nilai ujian nasional maupun hasil asesmen global (PISA, TIMSS, dll) menunjukkan kualitas pendidikan kita justru menurun. Jangankan pengembangan kompetensi murid, capaian nilai ujian pun mengalami penurunan.

Mengapa? Ketika ujian digunakan untuk memotivasi murid untuk belajar maka lahir kecenderungan menggunakan segala cara untuk mendongkrak nilai ujian. Bukannya membentuk ekosistem yang kondusif

untuk belajar, yang terbentuk justru ekosistem pendidikan yang elitis, diskriminatif, dan tidak sportif.

Kebijakan merdeka belajar harapannya bisa membangun kemauan belajar dari dalam diri semua pelaku pendidikan, murid, guru, orang tua, kepala sekolah, dan manajemen pendidikan. Belajar untuk mencapai tujuan yang bermakna, mencari cara yang tepat sehingga bisa belajar mandiri dan melakukan refleksi terus menerus untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Merdeka belajar adalah harapan kita untuk membalikkan arah pendidikan yang dalam lima belas tahun terakhir mengalami penurunan.

Bagaimana cara guru mengimplementasikan merdeka belajar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi?

Dalam pembelajaran jarak jauh, peran merdeka belajar menjadi semakin penting. Guru tidak bisa mengendalikan dan mengawasi murid secara langsung. Apa yang bisa dilakukan guru adalah upaya membangun kemerdekaan belajar murid sehingga murid tetap belajar meski tidak diawasi oleh guru. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

Pertama, memahami kegemaran, cara belajar dan latar belakang murid sebagai dasar bagi guru melakukan desain belajar yang tepat. Kedua, mendiskusikan tujuan pembelajaran sehingga murid bisa mengaitkan tujuan pembelajaran dengan kegemaran dan minatnya. Ketiga, mengurangi beban materi pembelajaran sehingga murid bisa lebih leluasa mengatur cara dan proses belajarnya.

Keempat, memberi tugas yang relevan dengan kegemaran dan kehidupan murid sehari-hari, bukan

tugas pengerjaan soal. Kelima, melakukan asesmen formatif berupa kuis yang menggembirakan (*fun*) dan menginformasikan pada murid tentang kemajuan belajarnya. Terakhir, melakukan sesi curhat yang memberi kesempatan pada murid untuk menceritakan pengalaman, perasaan, dan harapannya

Bagaimana idealnya peran orang tua dalam proses belajar anak, khususnya dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi?

Pembelajaran jarak jauh membuat peran orang tua menjadi semakin penting. Dulu, peran orang tua bisa diabaikan, tapi pada masa pandemi kita tidak bisa mengabaikan peran orang tua. Peran orang tua menjadi pendidik anaknya di rumah terutama bagi orang tua dengan murid pada pendidikan dasar dan anak usia dini.

Penting bagi orang tua berkomunikasi dengan guru mengenai tujuan pembelajaran, kebiasaan dan cara belajar, serta dukungan yang dibutuhkan guru. Masa pandemi adalah momen membangun kolaborasi antara orang tua dan guru.

Menurut Anda, bagaimana kapasitas guru di Indonesia saat ini?

Kapasitas guru di Indonesia itu beragam. Ada sebagian kecil yang merdeka belajar merdeka mengajar, sebagian besar belajar mengajar karena instruksi dengan kapasitas terbatas dan sebagian kecil lainnya kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Saya sudah berkeliling ke banyak daerah, selalu bisa menemui guru-guru merdeka belajar.

Apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru di Indonesia?

Konsekuensi dari kebijakan

belajar untuk ujian berdampak negatif pada guru. Guru diperlakukan seolah sebagai tukang angkot yang dikejar setoran. Semua program berlandaskan pada penunjukkan, bukan partisipasi; penyeragaman, bukan inisiatif lokal; dan pada ujungnya menuntut guru mencapai target nilai ujian muridnya. Guru kehilangan kemerdekaannya dalam menjalankan profesinya.

Tantangan lain pada perangkat teknologi dan terbatasnya akses internet di banyak daerah, baik untuk pembelajaran terpadu pada muridnya maupun untuk pembelajaran guru sendiri. Tanpa teknologi dan akses internet, guru di pelosok akan selalu ketinggalan dibandingkan rekan-rekannya di perkotaan.

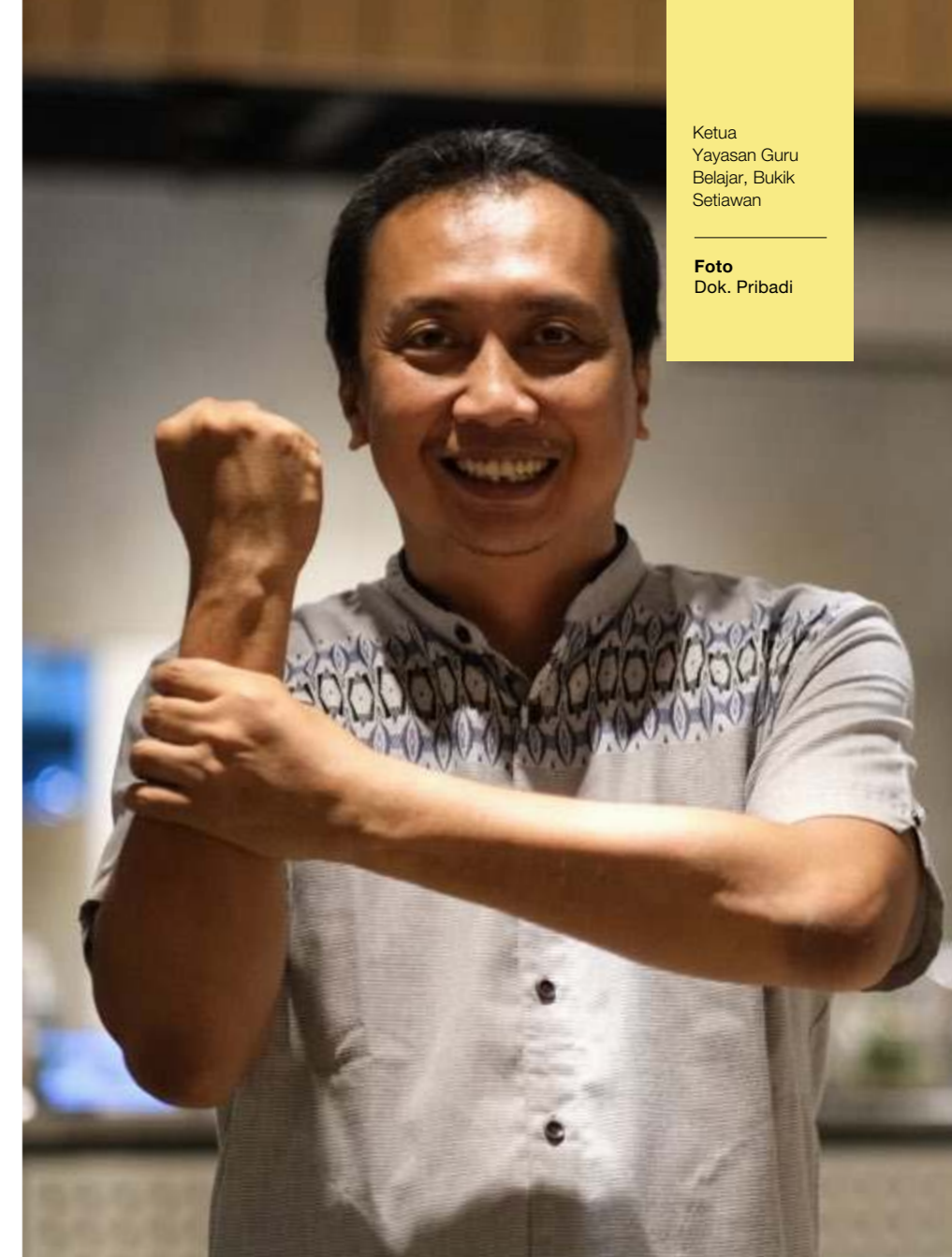
Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan performa dan inovasi para guru?

Kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim sudah tepat, merdeka belajar. Paket pertama merdeka belajar yang menghapus ujian nasional dan menyederhanakan RPP mengembalikan kemerdekaan pada guru untuk menjalankan profesinya.

Paket kelima yang berbentuk Program Guru Penggerak menjanjikan perubahan mendasar dalam pengembangan kompetensi guru. Pengembangan kompetensi guru tidak lagi terpusat, seragam dan monopoli pemerintah, tapi menyebar, beragam, dan bergotong royong dengan semua pihak.

Apa harapan pribadi Bapak terhadap program Guru Penggerak?

Harapan saya terhadap program Pendidikan Guru Penggerak yakni dapat melahirkan guru yang reflektif, guru yang terbuka terhadap masukan untuk



Ketua
Yayasan Guru
Belajar, Bukik
Setiawan

Foto
Dok. Pribadi

melakukan perubahan pendidikan yang berpihak pada anak. Guru yang bersekutu dengan murid untuk memajukan pembelajaran.

Jadi saya membayangkan, guru secara mandiri saling berbagi praktik baik pembelajaran dan berkolaborasi untuk memajukan pendidikan. Bila berkunjung ke suatu daerah, kita bisa menyaksikan sejumlah guru terlibat dalam percakapan yang bermakna.

Bagaimana harapan Anda terhadap dunia pendidikan, khususnya dunia guru di

Indonesia?

Per hari ini, saya optimis kapal besar pendidikan kita tengah berbalik arah dari penurunan kualitas menjadi kemajuan kualitas. Kuncinya pada merdeka belajar, berdaya dan gotong royong semua pihak. Termasuk wawancara ini menunjukkan kontribusi dari Kemenkeu untuk perubahan pendidikan. Percayalah, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sepihak, tapi tanggung jawab kita bersama.

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI (KPPBC) BENGKALIS

Si Nona Muda di Gelap Perbatasan

Teks A. Wirananda | Foto Dok. KPPBC Bengkulu



Bea
Cukai
BENGKALIS

Didirikan pada 1951, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bengkulu telah melewati sejumlah perubahan organisasi. Terakhir, pada 2017, kantor ini naik kelas dari tipe Pratama menjadi Madya. Kantor ini berada 200 kilometer di sisi timur laut Pekanbaru dan 130 kilometer di sisi selatan Malaka. Rentang jarak yang tak seberapa ini memicu Bengkulu tumbuh menjadi salah satu jalur penting bagi

pergerakan barang dari Indonesia menuju Malaysia atau sebaliknya.

Si Nona Muda

Ihwal mobilitas barang, terdapat istilah angkutan multimoda. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea dan Cukai, angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan setidaknya dua moda angkutan dalam satu kontrak. Dalam metode ini, pihak pengirim barang dan pihak sarana angkut merupakan satu entitas.

Sebaliknya, dalam metode non-angkutan multimoda, pihak pengirim barang dan pihak sarana angkut merupakan entitas terpisah. Secara singkat, metode non-angkutan multimoda berimbas pada mekanisme pelaporan barang yang akan dikirim. Selain pengirim mesti melaporkan sejumlah dokumen, barang itu juga akan diperiksa sebelum berpindah ke sarana angkut untuk memastikan kesesuaian barang yang dikirim dan barang yang diangkut.

Di Bengkulu, prosedur ini menjadi

tantangan bagi pihak pengirim barang—dalam hal ini, eksportir. Ony Ipmawan, kepala KPPBC Bengkulu menuturkan bahwa selama ini di wilayah Bengkulu, pengiriman dokumen administrasi kerap menjadi kendala. “Biasanya teman-teman (eksportir) itu ekspornya itu daftarnya di Pekanbaru tapi muatnya ada di Bengkulu,” tutur Ony. “Itu harus bawa dokumen dari daratan Sumatera,” ia melanjutkan, “dia kan harus nyebrang ke pulau Bengkulu,” tuturnya. Dari Pekanbaru, eksportir

harus menuju Pakning dengan waktu tempuh kisaran lima jam. Dari Pakning, mereka masih perlu menyeberang ke Bengkulu yang akan menandakan waktu satu sampai dua jam perjalanan. Setidaknya ditinjau dari jarak dan waktu yang mesti dilalui oleh pihak eksportir, situasi ini cukup merepotkan.

Sebagai respons atas kendala geografis yang ada, KPPBC Bengkulu mengembangkan aplikasi Si Nona Muda, Sistem Non-angkutan Multimoda. Melalui keberadaan Si Nona Muda

ini, eksportir tidak perlu mengantar dokumen ke Bengkulu. Dokumen dapat diserahkan melalui KPPBC Pekanbaru untuk kemudian diunggah ke peladen. Setelah dokumen terunggah, pihak KPPBC Bengkulu dapat mengunduh dokumen yang diperlukan untuk pengawasan.

Ony mengatakan, saat ini intensitas ekspor melalui angkutan non multimoda di Bengkulu masih terbilang besar. “Paling enggak setiap minggu pasti ada,” ia melanjutkan, “secara jumlah,



Beberapa kegiatan KPPBC Bengalalis

Foto Dok. KPPBC Bengalalis

Bengkalis saat ini meliputi hasil perkebunan dan kelautan. “Ada kelapa, ada pinang, terus sagu, udang, ikan juga kadang ada,” pungkask Ony.

Jalan gelap perbatasan

Tak lagi rahasia, wilayah perbatasan adalah wilayah yang rentan bagi menyusupnya barang-barang ilegal. Demikian pula yang terjadi dengan Bengkalis. Bentang jarak yang sepelemparan batu dengan negara tetangga, mau tak mau berimbas pada tugas yang lebih berat menghalangi wara-wiri barang gelap. Pria kelahiran

Pasuruan ini mengamini lara itu. “Ya memang ini ya, fakta memang ya,” tuturnya.

Ony berkisah, “Kalau nangkep narkoba di bandara itu kan, paling sepuluh gram, sekilo, kalau di sini ratusan, gitu. Saking masifnya seperti itu.” Ia mengatakan bahwa pesisir timur Sumatera adalah jalur yang dijadikan sebagai jalur masuk narkoba. Dari segi jumlah, barang haram yang masuk via jalur ini juga terbilang besar. Dalam beberapa bulan terakhir, KPPBC Bengkalis telah berhasil mengamankan puluhan kilogram narkoba. “Desember itu dapat 10 kilogram sabu, di bulan

Februari itu 19 kilogram,” Ony mengisahkan, “Terakhir yang kemarin ada liputannya juga, ganja malah itu.”

Situasi semacam itu tentu menjadi tugas berat bagi Ony dan tim sebagai salah satu pasukan benteng perbatasan. Sinergi dengan berbagai pihak tentu jadi prasyarat mutlak. Dalam operasi narkoba, KPPBC bermitra dengan Kepolisian dan BNN. “Kalau memang informasi bersama, misalnya dari BNN, kita *bareng* sama BNN. Kadang kita *bareng* dengan Polres sini (Bengkalis) atau juga dengan Bareskrim Jakarta ya,” tutur Ony.

Tak hanya barang terlarang seperti narkoba, Ony mengatakan bahwa peredaran barang ilegal lain juga cukup masif terjadi di wilayahnya. Barang ilegal ini umumnya golongan barang elektronik dan tekstil. “Yang sering ditangkap kan HP, terus tekstil, pakaian bekas, nah itu. Ya seperti itulah,” tuturnya. Bahkan selama pandemi, alih-alih berkurang, pergerakan barang ilegal justru meningkat. “Mereka enggak libur, jadi di saat semua orang berlibur, dia (penyelundup) malah keluar gitu kan,” tuturnya. Pun, operasi saat pandemi juga lebih merepotkan petugas bea dan cukai. Sebab, mereka tetap harus gesit kendati dalam balutan APD (alat pelindung diri) lengkap. Ony bersyukur sebab operasi yang dijalankan selama pandemi ini tidak menjumpai resistensi yang berarti. “Kalau sampai ada perlawanan, lempar kembang api atau bom molotov, ya bahaya banget itu,” tutur Ony.

Ony berharap, KPPBC Bengkalis dapat ditopang dengan infrastruktur yang lebih memadai. “Contoh membangun radar atau apa gitu. Itu juga sangat kami perlukan,” katanya. Ia mengatakan bila radar itu sudah ada, nantinya dapat digunakan bersama dengan kantor bea dan cukai di sekitar wilayah Riau. Selain itu, Ony juga berharap adanya pelatihan rutin untuk menunjang pegawainya di lapangan.

Bagaimana Debitur Melakukan Registrasi untuk Mendapatkan Subsidi Bunga?



Penyalur Kredit memberitahukan Debitur untuk melakukan registrasi online sesuai data pada SIKP;



Jika registrasi online tidak bisa dilakukan, Debitur bisa melakukan registrasi melalui/didampingi Penyalur Kredit;



Calon penerima subsidi bunga adalah Debitur yang telah melakukan registrasi dan memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Kaya Pengalaman Berkat Cobaan

Teks Dimach Putra | Foto: Dok. DJPB

Endah Martiningrum

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Seorang ibu nampak gelisah di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Satu tangannya mengamit sang buah hati yang masih kecil, sementara itu telapak tangannya yang lain tak henti mengusap perutnya. Di sekeliling mereka terlihat beberapa koper diletakkan sekenanya.

Perempuan bernama Endah Martiningrum itu terpaksa harus memutar-balik keluar area bandara. Kepergiannya menyusul sang suami ke Medan dalam keadaan hamil tujuh bulan tak akan diberi lampu hijau oleh petugas jika tanpa surat keterangan dari dokter. Terpaksa ia yang kepayahan dengan kandungan tujuh bulannya berdua bersama putri pertama yang berusia empat tahun harus mencari klinik untuk meminta surat sakti tersebut. Singkat cerita syarat dari pihak otoritas bandara tersebut berhasil dipenuhi dan terbanglah ia bersama putri kecilnya untuk memulai kehidupan baru di Medan.

"1999 itu tahun yang berat buat saya. Saya harus pisah dari rombongan beasiswa dan menunda keberangkatan studi ke Jepang karena sedang mengandung," buka perempuan yang akrab dipanggil Endah ini. Di saat kandungannya menginjak trimester akhir, datang kabar bahwa bapak mertuanya berpulang menghadap Sang Khalik. Momen tersebut ternyata menjadi titik balik bagi keluarga kecil Endah. Setelah berembuk, pasangan tersebut memutuskan untuk hijrah sekeluarga ke Medan.

"Saat itu suami mendapat wasiat untuk meneruskan bisnis keluarga di Medan. Saya juga akan segera berangkat ke Jepang," ungkap Endah. Usia putri keduanya baru satu setengah bulan ketika Endah harus menitipkan sang buah hati untuk dirawat sendiri oleh sang ayah dibantu keluarganya. Endah harus berbesar hati meninggalkan bayi kecil yang sedang membutuhkan dekapan

hangatnya untuk menjalankan kewajiban menimba ilmu ke negeri sakura.

Berkah dari restu keluarga

Mata Endah menerawang jauh mengingat perjalanan kariernya sejak awal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ingatannya terlempar kembali ke akhir tahun 1993. Perempuan asal Magelang itu tengah sibuk mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusannya dari Universitas Gajah Mada (UGM). Seorang teman mengajaknya ikut tes penerimaan pegawai negeri sipil. "Lucunya malah saya yang lolos, teman saya enggak," bebarnya.

Karir Endah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diawali di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Februari 1994. Dua hari menjelang wisuda ia mendapat telegram yang memberitahukan kelulusannya menjadi calon pegawai negeri sipil. Kabar itu sekaligus mewartakan masa *training* yang akan dimulai pada tanggal 21 Februari 1994. "Serba dadakan. Sabtu pagi saya wisuda, sorenya langsung ke Jakarta naik travel agar bisa ikut diklat Senin lusanya," ceritanya.

Ia sempat mengabdikan lima tahun di kantor pusat sebelum mendapat tawaran beasiswa ke Jepang. Sepulang dari studi S2, ia memutuskan untuk mengajukan permohonan penempatan di Medan untuk mendampingi keluarga. Tujuh tahun dihabiskan Endah di Tanah Deli. Bak kilau intan yang tak selamanya dapat disembunyikan, potensi Endah tertangkap bagian kepegawaian di kantor pusat saat BAKUN bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Atas seizin suami dan keluarga, ia berangkat kembali ke Jakarta. Dari situ karirnya melesat. Beragam posisi akhirnya ia rasakan.

Semester II tahun 2019 lalu ia menjadi salah satu pejabat yang masuk bursa mutasi lintas eselon 1. Saat ini

Endah menjabat sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sejak September 2019. Saat ditanya perbedaan dan tantangan dalam jabatannya kini, ia menjawab, "Tentu ada hal baru. Di EAS ini bukan hanya mengelola bendahara umum negara terkait dengan utang dan hibah, tetapi juga melakukan *settlement*-nya, dan sekaligus penyelesaian pembayaran kembali pinjaman dan utang pemerintah. Jadi, istilahnya kredibilitas pemerintah Indonesia itu adanya disini."

Membagi inspirasi

Belum genap setahun memimpin di Direktorat EAS, Endah harus menakhodai timnya di tengah perubahan sistem kerja akibat pandemi COVID-19. Ibu dari tiga orang putri ini tak gentar. Diakuinya bahwa ilmu pengetahuan yang cukup memang menjadi modal penting dalam beradaptasi dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun asam garam kehidupan yang telah ia cicipi selama inilah yang menjadikannya seorang yang mumpuni memimpin dalam segala kondisi.

"Saya juga belajar dari pengalaman saat menemani dan membantu membangun semangat teman-teman di Palu," ujarnya. Sebelum menempati posisinya saat ini, Endah menjalani penempatan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Tengah setelah gempa yang disusul tsunami dan likuefaksi melanda kota tempatnya akan berkantor. Di sana, salah satu fokus utamanya adalah penyediaan pendampingan dan memberi dukungan moril bagi pegawai yang mengalami trauma dalam level yang berbeda-beda.

Endah yakin kunci kekuatan timnya di masa sulit ini ada pada kekompakan dan rasa saling menguatkan satu sama lain. Untuk itu, ia mengadakan sesi yang diberi nama "inspirasi pagi". Sepekan

dua kali, setiap Senin dan Rabu ia mempersilakan timnya untuk berbagi kisah yang menginspirasi. Tujuannya adalah saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan membagi semangat positif. Sesi itu biasanya akan ia tutup dengan arahan disertai penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Penguatan nilai-nilai Kementerian Keuangan juga ia lakukan dengan mengadakan *capacity building* mandiri dengan permainan ringan sesuai olahraga bersama setiap Jumat pagi.

"Bagi saya, siapapun bisa menjadi inspirasi. Tidak perlu jauh-jauh, Bu Menkeu contohnya," ucap Endah. Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan beberapa pejabat perempuan di Kemenkeu, seperti Sumiyati (Inspektur Jenderal), merupakan inspirasi terbesar baginya. Ia melihat sosok-sosok tersebut sebagai teladan perempuan yang bisa menyeimbangkan keluarga dan karier, hal yang tentunya juga menjadi tujuan hidup Endah. Untuk tokoh yang sangat personal, ia mengagumi kedua orang tuanya yang mengajarkan disiplin dan kerja keras. Meski ibu dan ayahnya hanya seorang guru dan sang ibu memiliki usaha tambahan untuk membantu keluarga dengan berjualan kecil-kecilan, kedua orangtuanya mampu mengantarkan Endah dan kelima saudaranya lulus dari UGM di berbagai bidang masing-masing.

Merawat rindu hingga bertemu

Pandemi COVID-19 telah merampas kebebasan semua orang. Wabah ini membuat jarak makin terasa seperti gurun yang menanti hujan bagi keluarga yang tinggal terpisah. Sudah empat bulan Endah tidak bisa bertemu fisik dengan keluarganya yang kini telah menetap di Yogyakarta. "Selama lebih dari lima tahun sebelum saya menjabat eselon II, saya termasuk anggota Roker PJKA (rombongan kereta pulang Jumat kembali Ahad, -red)," ungkap Endah setengah bercanda.



Endah dan Keluarga

Foto Dok. Pribadi

Endah mengaku rindu naik kereta malam tujuan Yogyakarta untuk sampai di sana pada pagi harinya. Di Stasiun Tugu, suami dan tiga putrinya telah menantinya untuk kemudian berangkat mencari sarapan bersama atau belanja ke pasar membeli bahan yang akan diolah menjadi hidangan favorit keluarga. Perjalanan dalam mobil bersama keluarga selalu membawa kesan lebih bagi Endah. Dalam momen itu mereka sekeluarga bisa membicarakan segala hal. Pun belajar dari hasil diskusi mengamati fenomena-fenomena unik yang mereka temukan sepanjang jalan. Bahkan kebersamaan dengan keluarga di dalam mobil menjadi salah satu sarana bagi Endah untuk memberikan nasihat-nasihat kehidupan

bagi ketiga putrinya.

"Sekarang ya *dikuat-kuatin*. Untuk kebaikan saya dan keluarga di masa pandemi, sekaligus juga sebagai contoh bagi teman-teman di sini," tutur Endah. Ia hanya bisa berserah pada ketentuan-Nya. Ia selalu menanamkan keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan akan memberi solusi dari tiap cobaan yang ditimpakan ke umat-Nya. Satu pesan ayahnya yang selalu ia tanamkan dalam dirinya: *badai pasti berlalu*. Sesekali Endah juga bersantai sambil mendengar dan menyenandungkan lagu. Jurus itu cukup ampuh memberikan energi positif bagi dirinya. Sebuah hiburan sederhana bagi Endah, sambil menanti waktu yang tepat tiba hingga ia bisa berkumpul lagi bersama keluarga.

POTRET MASA MUDA

HAMKA

Peresensi Joko Susanto, pegawai DJP

Pribadi Buya Hamka sebagai sosok pahlawan nasional terus memancarkan pesona untuk digali inspirasinya. Tidak luput pula keunikan masa kanak-kanak dan masa mudanya. Rona kehidupannya laris diulas banyak orang dengan beragam sudut pandang. Spiritnya tidak usang ditelan perubahan zaman.

Menikmati novel ini, tidak terasa kita akan diajak bernostalgia mengenal biografi sosok Malik, nama asli Buya Hamka saat muda. Karya apik novel biografis ini dibuka dengan kisah menarik tentang pacuan kuda di gelanggang Kubu Gadang Payakumbuh, Sumatera Barat. Malik, tanpa diduga, saat berumur 13 tahun hari itu dipercaya menjadi joki sebuah kuda andalan karena sebuah alasan.

Mengisi hari liburnya, Malik kecil bersama teman-teman sekolahnya senang pergi menjelajah alam, bermain di bukit, di lereng Gunung Singgalang, berendam di kejernihan air Lubuk Mata Kucing, dan melihat pertandingan layang-layang di Batipuh. Dalam pertemanan, Malik dipercaya teman-temannya dan diperlakukan sebagai kepala kelompok. Sebutan itu diberikan karena berbagai hal, salah satunya disebabkan pengalaman bahwa ketika berkelahi, Malik sulit dikalahkan oleh teman-temannya. (halaman 75).

Anak 'kreatif' dan usil pada usianya kadang mengalami pengalaman yang

kurang mengesankan. Di usia mudanya, walaupun diterpa banyak tantangan, produktivitas Malik dalam berdakwah lewat menulis tetap tinggi. Sebuah roman berbahasa Melayu karyanya berjudul *Laila Majnun* diterbitkan Balai Pustaka. Umur Malik 24 tahun ketika roman itu muncul. Sebuah hasil gemilang menembus penerbit ternama dengan latar belakang pendidikan formal yang hanya sampai kelas 2 SD. Sebagai ungkapan rasa syukur dan ingat nasihat Haji Agus Salim, Hamka mengirimkan novelnya kepada tokoh senior itu. (hal 231).

Kecermatan Akmal Nasery Basral dalam meracik buku ini dengan pengalamannya yang pernah menjadi wartawan Gatra dan Tempo ini tidak diragukan lagi. Apalagi, referensi yang digunakannya pun seabrek sehingga karya ini menjadi lebih hidup, lengkap, dan detail. Penulis telah mampu menyajikan hal-hal baru dalam novel ini sebagai hasil jerih payah dalam risetnya yang mendalam sehingga menampilkan Hamka sebagai sosok langka yang pernah dimiliki bangsa Indonesia.

Novel pertama dari dwilogi ini terdiri dari 27 cerita. Sedangkan dwilogi keduanya berjudul *Serangkai Makna di Mihrab Ulama* direncanakan akan mengisahkan kehidupannya usia 31 hingga wafat di usia 73 tahun. Novel biografis ini pantas menjadi referensi keluarga nusantara untuk menjadi pribadi yang produktif dan inspiratif. Selamat membaca.



Judul	: Buya Hamka, Setangkai Pena di Taman Pujangga
Penulis	: Akmal Nasery Basral
Penerbit	: Republika Penerbit
Cetakan	: Pertama, Februari 2020
Tebal	: 328 halaman
ISBN	: 978-623-745-8449

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat



Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 About Friend, Penulis Tere Liye
- 2 Kumpulan Cerpen Horor, Penulis Primadonna Angela
- 3 13 Writers (Namun Kenyataannya Kehidupan Tak Selamanya Berjalan Mulus), Penulis Hardy Zhu, dkk
- 4 3 Cinta 1 Pria, penulis Arswendo Atmowiloto
- 5 3 Woman & Aguy, Penulis Ana Westy

SETELAH RATIFIKASI PARIS AGREEMENT, Perluakah Pungutan atas Karbon?

Teks Muhammad Sutartib, Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemanasan global menimbulkan dampak berbahaya bagi kehidupan seperti terjadinya kabut asap, naiknya permukaan air laut, krisis air bersih, hingga munculnya wabah penyakit. Perubahan iklim berupa pemanasan global ini biasanya dikaitkan dengan emisi gas karbondioksida (CO₂) atau dikenal dengan sebutan emisi karbon tanpa diimbangi konversi atau penyerapan kembali gas karbondioksida untuk diubah menjadi gas oksigen misalnya melalui proses fotosintesis dengan bantuan pohon atau tanaman berdaun hijau. Para ahli sepakat bahwa kontribusi utama dari emisi karbon utamanya disebabkan konsumsi sumber energi yang berbahan dasar fosil seperti gas alam, minyak bumi serta batu bara.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change* yang di dalamnya memuat

kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2° C hingga 1.5° C dari tingkat suhu pra industrialisasi maka perlu strategi khusus untuk mengelola energi yang pemakaiannya mengeluarkan emisi karbon, terutama energi yang memakai bahan bakar fosil.

Salah satu implementasi dari *Paris Agreement* yang dilaksanakan oleh berbagai negara karena dianggap paling *powerful* untuk memenuhi ketentuan konvensi tersebut adalah melalui penenaan pungutan atas emisi karbondioksida atau pajak karbon (*carbon tax*) untuk setiap kegiatan yang meninggalkan jejak karbon (*carbon finger print*). Cara memungut pajak karbon ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya, pabrik yang kegiatannya meninggalkan jejak karbon diwajibkan membuat laporan jumlah emisi karbon secara berkala dan dengan dasar inilah maka besarnya pajak karbon dapat dibayarkan.

Ada jenis pajak karbon yang lebih mudah cara memungutnya karena barangnya kasat mata dan mudah mengelolanya seperti mengenakan pajak karbon pada bahan bakar fosil atau batu bara dengan memakai skema *proxy* karena pada prinsipnya kita bisa menghitung berapa gram karbondioksida yang terbuang ke udara apabila kita membakar sejumlah bahan bakar minyak

Ilustrasi
Dimach Putra

per liter atau batu bara per kilogram. Besarnya tarif pajak karbon untuk minyak bumi bisa dikenakan untuk setiap liternya, sedangkan untuk batu bara setiap kilogramnya.

Pungutan karbon atas benda berwujud dan kasat mata

Apabila kita akan menerapkan pungutan atas karbon dalam bentuk pajak, saat ini belum diadopsi dengan Undang-Undang Perpajakan, tetapi apabila menggunakan mekanisme cukai secara filosofi lebih tepat sebab pungutan atas karbon ini pada dasarnya merupakan *pigovian tax* atau *corrective tax* yang secara tersirat tercakup dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, namun pada saat ini Undang-Undang Cukai hanya menyangkut barang yang

kasat mata. Dengan demikian, untuk barang-barang yang wujudnya jelas, pungutan karbon dapat dilakukan melalui cukai tanpa perlu membuat undang-undang baru, melainkan dengan peraturan pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan rakyat.

Apa itu cukai? Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini, yang meliputi barang-barang yang: (a) konsumsinya perlu dikendalikan; (b) peredarannya perlu diawasi; (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pada prinsipnya semua barang yang memiliki sifat dan karakteristik di atas, baik hanya memenuhi salah satu sifat dan karakteristik atau memenuhi keempat sifat dan karakteristik tersebut secara akumulatif dapat dikenakan cukai. Dengan demikian emisi karbon pun dapat dikenakan cukai karena memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Pungutan karbon atas benda berwujud ini bisa juga diterapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun kelemahan dari mekanisme ini biasanya terletak pada penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran.

Pungutan karbon atas kegiatan yang meninggalkan jejak karbon

Pungutan karbon atas kegiatan yang menimbulkan emisi karbon, misalnya kegiatan di pabrik semen, pabrik keramik, industri pertambangan, dll. belum bisa diterapkan dengan mekanisme pajak atau cukai karena belum diakomodasi oleh undang-undang. Sementara, penghitungan emisi karbon dalam kegiatan-kegiatan industri dapat dilakukan dengan mengandalkan penghitungan *mass and energy balance* secara berkala untuk penentuan basis pemungutannya. Yang perlu didiskusikan selanjutnya adalah instansi mana yang mengampu tugas tersebut sekaligus bertanggung jawab terhadap pemungutan maupun auditnya. Sementara itu, nilai pungutan yang diperoleh atas karbon dapat dimasukkan ke dalam PNBP.

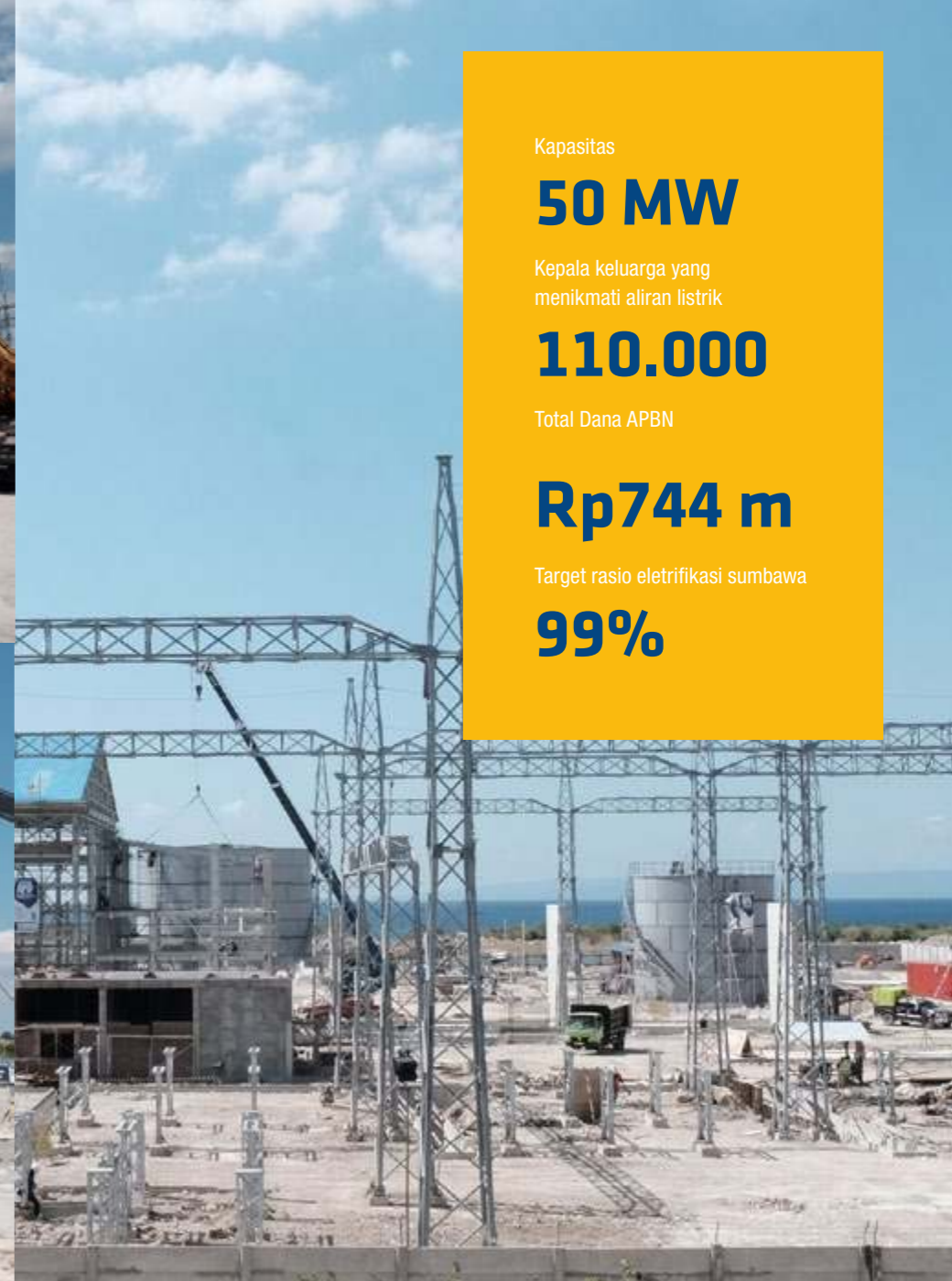
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pungutan atas emisi gas karbondioksida merupakan salah satu solusi yang *powerful* untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Pungutan karbon atas barang yang konsumsinya akan menimbulkan emisi karbon dan wujud barangnya kasat mata bisa memakai mekanisme cukai. Sedangkan, pungutan karbon atas industri atau kegiatan yang menimbulkan jejak karbon bisa menggunakan mekanisme PNBP, tetapi harus ada kejelasan institusi mana yang akan bertanggung jawab dalam mengaudit emisi karbon tersebut.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Suplai Energi, Terangi Negeri

Foto dan Teks Resha Aditya Pratama

Terletak di Badas Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa dimulai pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2019. PLTMG merupakan jenis pembangkit yang menggunakan bahan bakar *dual fuel*, yaitu LNG (*liquid natural gas*) dan BBM (bahan bakar minyak). Berdasarkan data 2016, kondisi kelistrikan pada saat itu hanya 38 Mega Watt (MW), dan kebutuhan masyarakat sebesar 35 MW sehingga sering menyebabkan pemadaman di Sumbawa. Namun dengan hadirnya PLTMG Sumbawa yang memiliki kapasitas 50 MW ini, pasokan listrik di Sumbawa bertambah dua kali lipat dan dapat melistriki kurang lebih 110.000 kepala keluarga. PLTMG Sumbawa menggunakan dana APBN dengan total anggaran Rp744 miliar dan merupakan bagian dari Program 35.000 MW yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan hadirnya PLTMG Sumbawa, diharapkan rasio elektrifikasi Sumbawa dapat meningkat mencapai 99 persen serta akan menumbuhkan bisnis, industri, dan ekonomi di NTB.



Kapasitas

50 MW

Kepala keluarga yang menikmati aliran listrik

110.000

Total Dana APBN

Rp744 m

Target rasio elektrifikasi sumbawa

99%

DISRUPSI

Perdagangan Internasional dan Kebijakan Fiskal

Teks Subagio Effendil,
pegawai Tugas Belajar di University of Technology Sydney,

Wabah pandemi COVID-19, selain menciptakan krisis kesehatan global, telah menimbulkan disrupsi yang masif pada tatanan perdagangan internasional. Dari sisi penawaran (*supply*), upaya lockdown dan working from home mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi (*labor shortage*). Upaya ini juga mengharuskan pemerintah untuk menutup pelabuhan air dan udara yang menghambat distribusi barang antarnegara. Laporan International Air Transport Association menunjukkan penurunan kuantitas transportasi kargo internasional sampai dengan bulan Maret 2020 sebesar 23 persen secara year-on-year dengan estimasi kerugian mencapai US\$1,6 miliar. Lebih lanjut, kebijakan negara untuk menerapkan pembatasan ekspor (*export restrictions*) demi melindungi pasokan domestik turut menambah kompleksitas permasalahan. World Trade Organization (WTO) mencatat 80 negara, termasuk di dalamnya negara-negara yang menjadi 'lambung' pangan

dunia, seperti Rusia, Vietnam, dan Argentina, serta otoritas kepabeanan telah menerapkan export restrictions atas perlengkapan medis, bahan pangan, dan kertas toilet.

Dari sisi permintaan (*demand*), perubahan preferensi konsumsi akibat COVID-19 menyebabkan *mismatch* antara permintaan dan penawaran. Untuk makanan, misalnya, studi terbaru dari Food and Agriculture Organization menemukan peningkatan minat konsumen terhadap produk makanan yang memiliki cangkang atau kulit serta dikemas dengan rapat. Bahkan, konsumen di beberapa negara tidak segan untuk menolak produk makanan yang berasal dari Tiongkok. Selain itu, upaya *lockdown* mengharuskan pemerintah untuk menutup pasar tradisional sehingga membatasi akses konsumen terhadap bahan pangan yang mengakibatkan peningkatan *food waste*.

Permasalahan ganda pada *supply* dan *demand* menyebabkan penurunan kuantitas perdagangan internasional secara signifikan. WTO mengestimasi penurunan perdagangan tahun ini mencapai 13 persen hingga 32 persen

(setara US\$8 triliun) terutama di sektor jasa komersial dan barang dengan *supply chain* yang kompleks. Di samping itu, secara fundamental, disrupsi ini juga membuat premis *comparative advantage* (David Ricardo, 1817) yang menjadi fondasi ekonomi pasar dan perdagangan internasional menjadi diragukan validitasnya. Premis klasik yang berargumen bahwa *social welfare* akan optimal jika negara melakukan spesialisasi dengan memproduksi barang yang memiliki *opportunity cost* terendah sesuai ketersediaan faktor produksi serta membeli kebutuhan lainnya di pasar internasional, nampaknya hanya absah bila mekanisme perdagangan internasional tidak terdisrupsi. Sebaliknya, dalam kondisi terjadi *supply and demand shocks*, semua negara akan berusaha memproduksi seluruh kebutuhannya di dalam negeri dan sedapat mungkin membatasi ekspor produknya ke luar negeri.

Beberapa negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin bahkan telah mengadopsi konsep Food Sovereignty and Solidarity yang memberikan hak konstitusional kepada rakyat



untuk menentukan pilihan produksi dan konsumsi pangan yang terbaik termasuk penerapan sistem agrikultur yang sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal. Dalam konsep ini, bahan pangan ditempatkan sebagai bagian dari solidaritas kemanusiaan, bukan komoditas komersial sehingga terbebas dari semua ketentuan ekonomi pasar dan perdagangan internasional. Indonesia telah mengadopsi konsepsi kedaulatan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan namun belum diterapkan secara holistik.

Disrupsi perdagangan internasional juga membuat upaya untuk menjaga daya beli masyarakat di masa resesi menjadi problematik. Harus diakui Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan yang esensial di masa pandemi seperti pangan, energi, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Badan Pusat Statistik mencatat total impor

minyak bumi, beras, gandum, daging, dan kedelai pada tahun 2019 masing-masing mencapai 40.926; 444; 10.692; 262; dan 2.670 ribu ton. Kelangkaan barang esensial di pasar domestik akibat terganggunya impor tentunya akan memicu *supply-push inflations* yang memukul daya beli masyarakat. Bahkan, jika berkelanjutan, masalah ini dapat memicu konflik sosial yang membuat 'ongkos' penanganan pandemi menjadi semakin tinggi.

Oleh karenanya, pemerintah perlu segera melakukan langkah strategis untuk memitigasi dampak disrupsi perdagangan sekaligus mencegah krisis kesehatan berkembang menjadi krisis pangan. Dari perspektif kebijakan fiskal, pemerintah telah berupaya mendorong peningkatan pasokan pangan domestik dengan memasukkan industri pertanian, pengolahan bahan pangan, perdagangan, dan jasa penunjang pertanian dalam daftar penerima insentif pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 44/PMK.03/2020. Kelompok petani skala kecil juga mendapatkan fasilitas penundaan angsuran pokok dan subsidi bunga atas pinjaman usaha selama enam bulan.

Upaya selanjutnya, otoritas fiskal dapat merelaksasi pungutan bea masuk serta pajak impor lainnya atas produk esensial dan menggunakan instrumen kebijakan fiskal, setelah berkoordinasi dengan otoritas perdagangan, sebagai *bargaining chips* untuk mengafirmasi komitmen para mitra dagang di kawasan, terutama negara-negara produsen bahan pangan seperti Australia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar, untuk tetap memberikan akses pasar dan tidak melakukan *export restrictions* di masa pandemi.

*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan/perspektif institusi tempat penulis bekerja.

Menjadi Versi Terbaik dari Diri

Teks CS. Purwowidhu

Perhelatan wisuda yang sejatinya menjadi pengukur sejarah dalam perjalanan setiap insan intelektual tak ayal digelar secara daring di tahun 2020 ini untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Namun kondisi tersebut tak mengurangi sukacita yang terpancar kala itu dari wajah sang wisudawati pengemban gelar Master of Public Health, Nadhira Nuraini Afifa, dan segenap anggota keluarga yang turut hadir menemaninya dalam wisuda virtual Harvard School of Public Health di penghujung Mei 2020. Terlebih pada momen tersebut Nadhira didapuk sebagai *student speaker* mewakili angkataannya. Kesempatan istimewa itu diperolehnya setelah melewati beberapa tahap seleksi.

Melalui pidato yang dibawakannya dengan lancar dan natural itu, Nadhira menuturkan betapa pentingnya peran kesehatan masyarakat dalam membangun solidaritas global untuk penanganan pandemi. “Melalui kesehatan masyarakat, orang-orang dipersatukan tanpa memandang perbedaan etnis, kebangsaan, dan spiritualitas,” tandasnya. Kecharuan saat itu juga nampak nyata dari raut wajah sang ibu tatkala mendengar namanya diapresiasi oleh puteri bungsunya dalam pidato pada wisuda virtual tersebut. Terlepas dari kenangan hari bahagianya, bagi Nadhira, euforia kelulusan hanyalah momen sesaat, seperti nasihat sang ayah yang tersemat erat dibenaknya, “Ingat, kontribusi apa yang mau kamu berikan selepas ini,” ungkapnya.

Inovasi penanggulangan pandemi

Setelah setahun menempuh studi di Amerika, Nadhira kembali ke Indonesia, tepatnya di bulan April 2020 lalu. “Sebenarnya masih tersisa dua bulan lagi sebelum *graduation*, tapi karena kelasnya sudah *online* semua akibat pandemi jadi aku pulang saja,” ujarnya. Berbekal seluk beluk ilmu kesehatan masyarakat yang ditimbanya selama studi, seperti kebijakan kesehatan, inovasi kesehatan global, dan ekonomi kesehatan, Nadhira bertekad memberi yang terbaik melalui ilmunya. Tak berselang lama, sepulangnya ke Indonesia awal april lalu, Nadhira dan timnya berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta membangun inovasi penanganan COVID-19 berupa fitur kalkulator COVID-19 yang diberi nama JakCLM di aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang dapat diunduh melalui *smart phone*.

Fitur ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk melakukan cek mandiri gejala COVID-19. Teknologi CLM (Corona Likelihood Metric) berbasis *machine learning* yang digunakan pada fitur tersebut menjadikan hasil tes gejala lebih akurat. Dari hasil tes yang diperoleh, pengguna akan diberikan rekomendasi untuk menjalani *rapid test* atau PCR test. “Jadi kita ingin orang-orang yang skornya tinggi dari aplikasi ini bisa dirujuk langsung ke PCR dan kemungkinan besar PCR-nya akan positif. Dengan begitu PCR-nya akan tepat sasaran dan akhirnya menghemat biaya juga,” pungkas pemenang kompetisi hackathon MIT Innovation in

Global Health Systems 2019 itu.

Sebagai seorang dokter sekaligus ahli kesehatan masyarakat, Nadhira mengapresiasi kedisiplinan masyarakat Indonesia dalam menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yang dinilainya masih jauh lebih baik dibandingkan Amerika. Di lain pihak, ia juga berharap agar tenaga medis lebih diperhatikan kesejahteraannya. “Karena tenaga medis bekerja sangat keras di masa pandemi ini,” ucapnya.

Menjatuhkan pilihan

Tiada terbersit sebelumnya untuk menjadi profesional di bidang kesehatan masyarakat, pengalamanlah yang membawa Nadhira ke destinasi tersebut. Selama bertugas sebagai koas di Lombok ia banyak menangani anak-anak yang menderita *stunting* dan malnutrisi. Ia belajar bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat utamanya terletak pada sistem. “Kebijakan publik yang tepat akan sangat *impactfull* untuk orang banyak dalam satu waktu,” tandas perempuan yang baru beranjak 25 tahun tersebut. Setelah melakukan banyak riset untuk meyakinkan diri atas *passionnya* dan jurusan yang dapat mengakomodir *passion* tersebut, Nadhira memutuskan untuk mendaftar ke Harvard School T.H. Chan of Public Health.

Terinspirasi dari kedua kakaknya yang terlebih dahulu menjadi *awardee* beasiswa LPDP, ia pun memutuskan jejak yang sama. “Jadi saat aku mencari beasiswa, *top in mind*-nya hanya

juga salah satu yang paling *generous*,” ujarnya. Ia pun mulai mencari *role model*, memecah mimpinya menjadi *goal-goal* lalu merincinya ke dalam *to do list* harian dengan *time table* yang terukur. “Akhirnya mimpi yang sebelumnya kelihatan jauh banget itu jadi nampak makin jelas,” katanya.

Fokus mempersiapkan diri

Sempat tidak lulus ketika mendaftar Harvard di tahun 2017 tak menyurutkan semangat Nadhira untuk kembali mencoba mendaftar di akhir tahun 2018. Ia belajar dari kegagalan sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan. Kala itu, di tengah hiruk pikuknya mengobati pasien di sebuah rumah sakit di Lombok, NTB, ditambah gempa yang kerap terjadi di sana pada pertengahan 2018, Nadhira tetap fokus mempersiapkan diri menggapai impian masuk Harvard. Manajemen waktu menjadi tantangan terbesar untuknya tempo itu. 1,5 tahun pun dilakoni demi persiapan

matang. Mulai dari mengulang test GRE (Graduate Record Examination), konsultasi dengan mentor, hingga menyusun *personal statement*. “*Personal statement* yang paling lama aku kerjain kira-kira satu tahun dan revisi sampai 11 kali,” kenangnya. Nadhira menuturkan kunci membuat *personal statement* adalah autentisitas. “Pilih satu tema spesifik yang kita anggap paling menarik dan paling menggambarkan diri kita,” tutur alumni FKUI ini.

Kali kedua mencoba, Nadhira akhirnya diterima berkuliah di Harvard School of Public Health. Ia memilih departemen Global Health and Population dengan konsentrasi studi di bidang nutrisi. Masa awal orientasi perkuliahan di 2019 menjadi ujian tersendiri bagi Nadhira. Ia sempat merasa minder dan minoritas karena selain di angkatannya pada tahun tersebut hanya ia sendiri yang berasal dari Indonesia, ia juga dikelilingi teman-teman profesional yang lebih senior darinya. Namun Nadhira tetap semangat

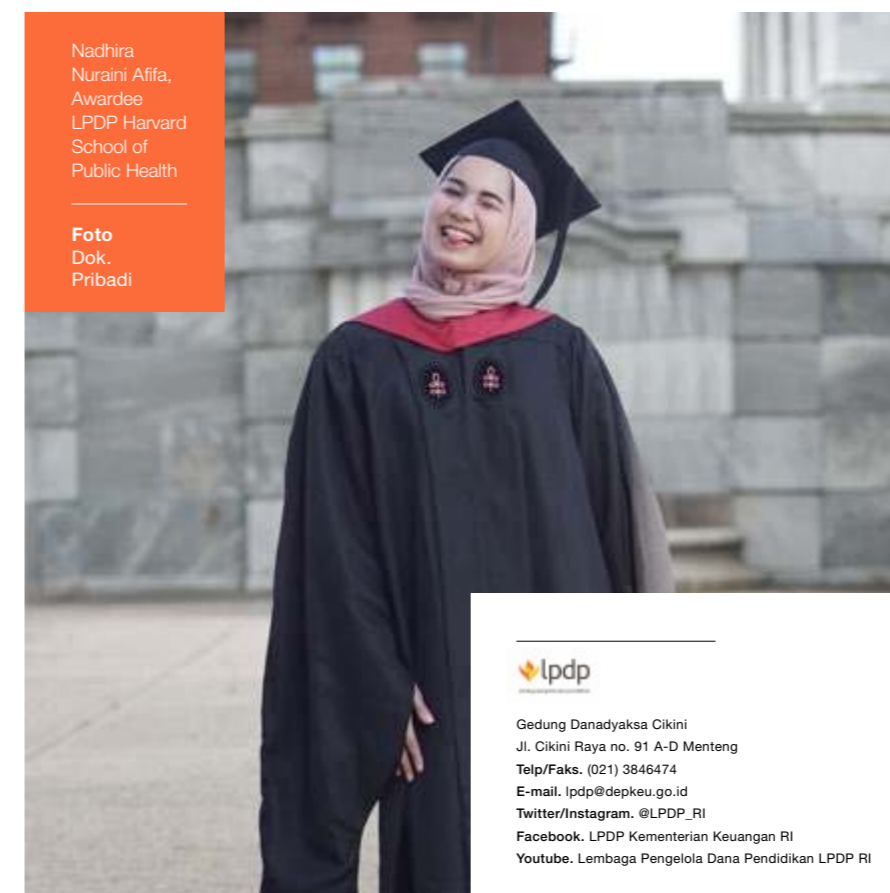
beradaptasi dengan lingkungan yang sama sekali baru baginya. Seiring berjalannya waktu ia pun cakap mengatasi tantangan adaptasi. Datangnya beragam kesempatan untuk mengembangkan diri kian menambah semangatnya menikmati hari-hari di Harvard. “Menariknya memang di Harvard itu banyak banget membuka kesempatan ke berbagai pengalaman yang tingkatnya internasional gitu,” ucap salah satu delegasi Harvard dalam peninjauan kesehatan Afrika tersebut.

Menorehkan pemikiran

Nadhira meresapi betul arti menulis bagi dirinya. Jejak pemikirannya dapat dilihat melalui berbagai karya tulisannya seputar kesehatan masyarakat di lini media massa. Ia mulai rutin menekuni aktivitas ini sejak 2017. Dalam setahun ia menghasilkan sekitar lima atau enam tulisan. Nadhira menikmati proses dalam menulis yang mengharuskannya banyak membaca dan melakukan riset, “Proses dalam menulis itu sendiri bikin wawasanku bertambah, terlepas dari tulisannya akan terpublikasi atau tidak,” ungkapnya.

Perempuan yang selama studi aktif sebagai jurnalis untuk majalah Harvard Voices in Leadership ini menuturkan menulis mendatangkan banyak manfaat. Lewat menulis, bukan hanya kita dapat membagikan pemikiran kepada orang banyak tapi juga dapat membuka pintu kolaborasi dengan banyak pihak. “Dengan banyak yang membaca tulisan kita, otomatis *network* kita jadi lebih luas,” tuturnya.

Nadhira berpesan kepada para generasi muda untuk tidak lelah mengejar mimpi setinggi apapun itu “Karena *at the end* itu mungkin banget loh untuk digapai,” ucap peraih predikat kelulusan Cum Laude ini. Ia juga berharap anak muda Indonesia tetap produktif dan menjaga semangat kompetitif walau di masa pandemi. “Harus terus memperluas wawasan dan memperkaya ilmu, bukan untuk mengalahkan orang lain tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri,” pungkasnya.



Nadhira Nuraini Afifa, Awardee LPDP Harvard School of Public Health

Foto Dok. Pribadi



Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

BERWISATA BAHARI KE KENDARI

Teks dan Foto Sanda Aditya Arisandi

Indonesia bagian timur memang terkenal dengan keindahan baharinya. Begitu pula dengan Kendari. Ibukota provinsi Sulawesi Tenggara ini adalah pintu gerbang bagi surga bawah laut Wakatobi. Sayangnya untuk menuju jantung dari segitiga karang dunia ini dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak mengingat Anda masih harus menyambung penerbangan rintisan ke Wangi-Wangi (salah satu pulau di Kepulauan Wakatobi). Jika dana dan waktu terbatas, Anda dapat berkeliling sekitar Kota Kendari untuk bisa jatuh cinta dengan kota ini.

Pantai Nambo nan memukau

Saya memulai petualangan di Kendari berkunjung ke Pantai Nambo yang terletak 17 km atau sekira 30 menit berkendara dari pusat kota. Pantai ini hanyalah satu dari banyak pantai indah lain di Kendari. Di sebelah kiri pantai terdapat sign besar Pantai Nambo yang cocok untuk berswafoto. Di sebelahnya terdapat mercusuar tiga lantai yang cukup menantang untuk dinaiki. Tempias ombak sesekali membasahi wajah, saat saya menaiki anak tangga menuju puncak mercusuar.

Daya tarik lain pantai ini adalah hamparan pasir putih membentang sepanjang 300 meter. Cukup menyenangkan berjalan tanpa alas kaki merasakan pasir dan sesekali hampasan ombak diantara jemari kaki. Meski menghadap ke Laut Banda, ombak di pantai ini relatif kecil sehingga cukup aman bagi pengunjung untuk berenang di tepian. Tak lengkap rasanya berwisata ke pantai tanpa menikmati kelapa muda segar. Sebatok minuman segar itu saya habiskan di gazebo kecil yang tersedia di sepanjang pantai sambil menikmati semilir angin pesisir.

Jatuh hati dengan Pulau Bokori

Puas bermain air di Pantai Nambo, tak lantas mengurungkan niat saya untuk menyeberang ke Pulau Bokori. Meskipun masuk Kabupaten Konawe, Pulau Bokori sering diasosiasikan sebagai wisata andalan Kendari mengingat jaraknya yang hanya 25 km saja dari pusat kota. Saya memilih pelabuhan rakyat di Desa Bajo sebagai titik keberangkatan. Di sini kita sekaligus dapat berinteraksi dengan Warga Suku Bajo yang dikenal sebagai penjelajah lautan itu.

Penyeberangan ke Pulau Bokori membutuhkan waktu 10 - 15 menit dengan ongkos sekitar Rp20.000/orang. Mendekati dermaga pulau itu, mata saya dimanjakan garis pantai berpasir putih bersih nan menyalurkan, kontras dengan



air laut jernih bergradasi warna biru kehijauan. Pulau kecil ini menawarkan beragam aktivitas rekreasi air yang menyenangkan. Tak ayal banyak instansi mengadakan acara *gathering* di sini. Fasilitas di pulau ini relatif lengkap seperti gazebo, penginapan, restoran, *amphiteater*, kamar bilas/toilet, dan papan informasi.

Pengunjung bisa melakukan *snorkeling* atau sekedar berenang di pantai yang berombak tenang. Menghabiskan senja dan menikmati matahari terbenam di pulau ini adalah salah satu pengalaman yang layak untuk dikenang. Meskipun demikian, bagi Anda yang lebih menyukai suasana tenang, Anda dapat mencoba menyusuri sisi lain dari Pulau ini. Dengan melewati jembatan kayu, Anda akan berada di jalan setapak sunyi yang membelah hutan mangrove.

Keindahan masjid di Teluk Kendari

Kesan pertama saya ketika berkeliling kota ini adalah, "Kendari memiliki banyak masjid yang megah". Tak mengherankan juga bila salah satu

landmark Kota Kendari adalah Masjid Terapung Al Alam. Berbeda dengan sejenis lainnya di Indonesia, Masjid Al Alam terletak cukup jauh (sekitar 1,6 km) dari daratan. Berada tepat di tengah Teluk Kendari, kita dapat menikmati pemandangan khas teluk dengan hilir mudik perahu nelayan dan kapal pengangkut barang. Masjid indah berkapasitas hingga ribuan orang ini memiliki empat menara dan menjadi pemandangan utama di teluk Kendari dari tepi laut.

Sebelum pulang, sempatkan mampir ke toko oleh-oleh untuk memborong aneka olahan kacang mede yang merupakan komoditas andalan Kendari. Tidak ada salahnya mencoba sensasi geli saat menyantap *sinonggi*, makanan khas Sulawesi Tenggara yang terbuat dari bubur sagu. Bagi yang tidak biasa seperti saya, makan *sinonggi* bagai makan buah simalakama: dikunyah tak habis, ditelan langsung tak bisa.

Artikel dalam rubrik ini terbuka untuk umum. Kirimkan naskahmu ke alamat email mediakeuangan@kemenkeu.go.id sertakan nama, alamat, dan no telepon.



NYAMAN SAAT PENSIUN

Ketika Anda baru pertama kali bekerja, memikirkan masa pensiun masih terkesan terlalu dini. Euforia menerima penghasilan sendiri mungkin membuat Anda lebih memilih menghabiskan penghasilan tahun-tahun pertama bekerja untuk melakukan pengeluaran yang sifatnya konsumtif, seperti berbelanja, membeli gadget terkini, liburan, dst. Anda berpikir bahwa menabung ataupun berinvestasi bisa dilakukan nanti-nanti saja dan juga begitu yakin bisa mengejar ketinggalan tersebut seiring dengan semakin besarnya penghasilanmu suatu saat nanti.

Mulailah Anda masuk pada fase usia menikah. Anda pun mulai menyiapkan dana untuk pernikahan. Karena *wedding day* adalah hari yang paling bersejarah dan spesial yang tidak akan terlupakan seumur hidup, maka Anda tidak terlalu mepedulikan berapa tabungan yang akan terkuras. Jangankan memikirkan dana pensiun, tabungan saja sudah minim. Tapi hal ini juga tidak lantas

membuat Anda khawatir karena Anda yakin akan bisa mengejar investasi seiring dengan naiknya posisi jabatan Anda di kantor. Setelah menikah, Anda mulai beradaptasi dengan pasangan mengenai pengaturan keuangan bersama. Saat inilah baru Anda sadari, ternyata pengeluaran semakin membesar. Belum lagi ketika anak-anak mulai hadir, Anda pun mulai membuat alasan untuk menunda investasi pensiun.

Tanpa terasa tahun berganti tahun. Anak-anak Anda tumbuh dewasa. Anda pun mulai mendekati masa pensiun. Ketika masa pensiun tiba, Anda mulai menerima tunjangan pensiun dari kantor. Di situlah Anda sadar bahwa dana pensiun dari kantor rupanya tidak dapat mencukupi gaya hidupmu selama ini. Anda pun mulai berpikir "Andai saja kemarin-kemarin saya menyiapkan dana pensiun". Tapi apalah daya, selama masa produktif, Anda lebih memilih untuk memberikan alasan-alasan menunda investasi pensiun. Liburan berkali-kali dalam setahun terasa lebih menyenangkan untuk

dilakukan daripada menyisihkan sedikit untuk dana pensiun.

Hasil survei Kementerian Ketenagakerjaan tentang kehidupan para pensiunan di Indonesia menunjukkan hanya 1 persen pensiunan hidup bahagia dan sejahtera, 4 persen punya cukup uang untuk hidup, 5 persen tidak punya pilihan selain bekerja di usia 65 tahun, 54 persen hidup di bawah garis kemiskinan, dan 36 persen meninggal. Jika Anda saat ini belum mulai menyisihkan penghasilanmu, seberapapun itu, dengan alasan masih banyak pengeluaran dan lain-lain, maka Anda boleh berharap Anda akan masuk kategori pensiunan yang beruntung menjadi kelompok 4 persen yang masih memiliki uang yang cukup untuk hidup. Atau Anda bisa saja menjadi kelompok 5 persen yang masih harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, Anda juga bisa masuk kategori kelompok 54 persen yang berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk itu, jadilah kelompok 1 persen! Siapkan dana pensiunmu dari sekarang. Bukan masalah nominalnya, tetapi ini adalah soal kerutinan berinvestasi demi pensiun yang nyaman dan tidak menyusahkan orang di

Foto Resha Aditya P

Mas Praim

"Biar Berat, Asal Sehat dan Selamat"

Cerita : Dimach Putra Gambar : Ditto Novenska



MEDIAKEUANGAN



HARI KUCING SEDUNIA
8 AGUSTUS 2020

Foto
Andi Al Hakim